



**EVALUASI PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS
PERDESAAN (PUAP) PADA GABUNGAN KELOMPOK TANI
(GAPOKTAN) KARANG MAKMUR LUMAJANG**

SKRIPSI

Oleh :
Aini Masruroh
NIM 111510601041

DPU : Mustapit, SP., M.Si.
DPA : Djoko Soejono, SP., MP.

**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS JEMBER
2016**



**EVALUASI PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS
PERDESAAN (PUAP) PADA GABUNGAN KELOMPOK TANI
(GAPOKTAN) KARANG MAKMUR LUMAJANG**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan untuk Menyelesaikan
Program Sarjana pada Program Studi Agribisnis
Fakultas Pertanian Universitas Jember

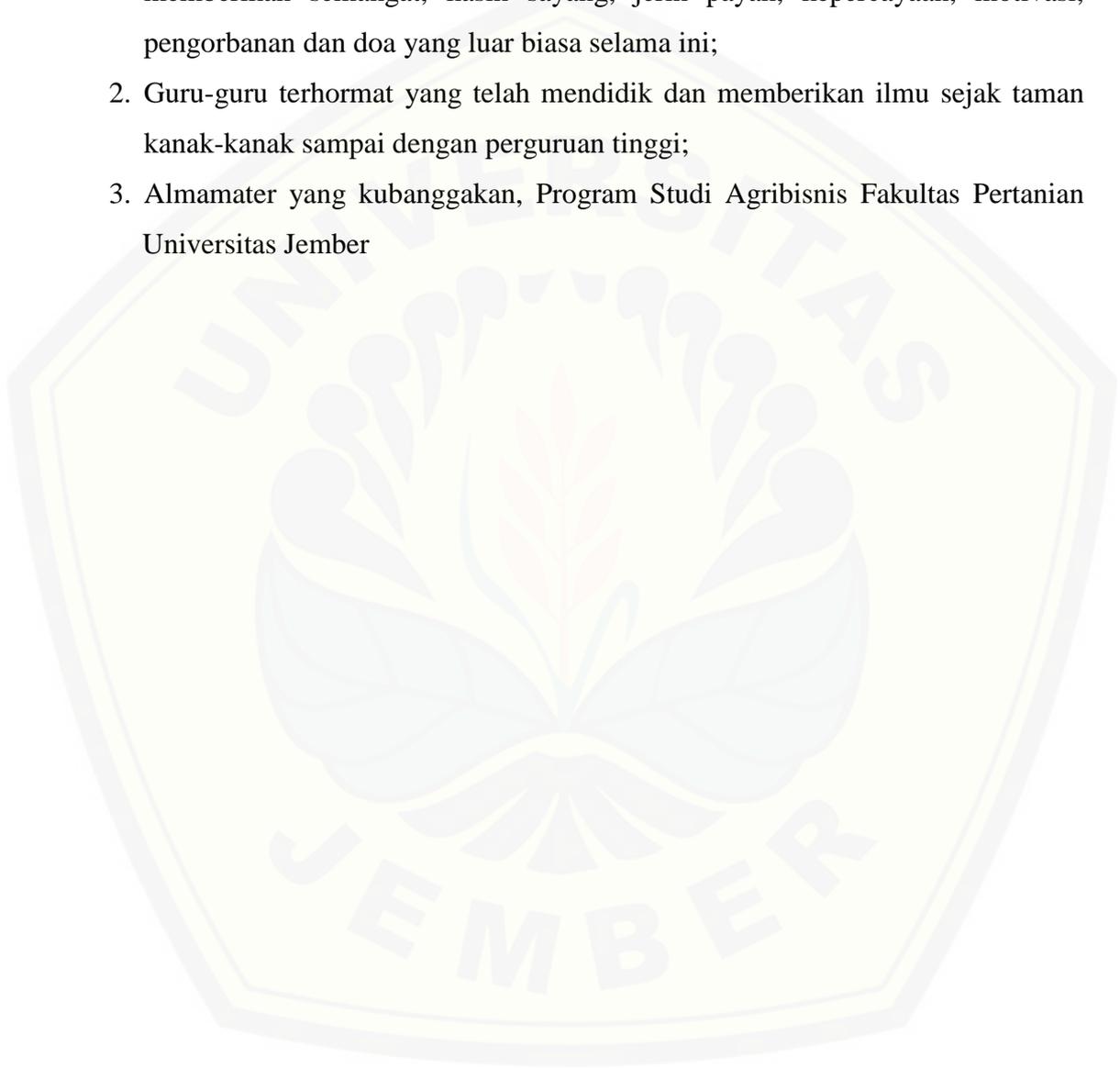
Oleh:
Aini Masruroh
NIM. 111510601041

**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS JEMBER
2016**

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ayahanda Muhiyi dan Ibunda Nurul Qomariyah tercinta yang telah memberikan semangat, kasih sayang, jerih payah, kepercayaan, motivasi, pengorbanan dan doa yang luar biasa selama ini;
2. Guru-guru terhormat yang telah mendidik dan memberikan ilmu sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi;
3. Almamater yang kubanggakan, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember



MOTTO

Tiada suatu usaha yang besar akan berhasil tanpa dimulai dari usaha yang kecil
(Joeniarto)

*Jika kamu menetapkan tujuan kamu yang begitu tinggi dan itu gagal, kamu akan
jatuh diatas kesuksesan yang lain*
(James Cameron)

*Kita berdoa kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya kita juga
berdoa dalam kegembiraan besar dan saat rezeki melimpah*
(Kahlil Gibran)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aini Masruroh

NIM : 111510601041

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Karya Tulis Ilmiah berjudul: **“Evaluasi Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) pada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Karang Makmur Lumajang”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Mei 2016
yang menyatakan,

Aini Masruroh
NIM. 111510601041

SKRIPSI

**EVALUASI PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS
PERDESAAN (PUAP) PADA GABUNGAN KELOMPOK TANI
(GAPOKTAN) KARANG MAKMUR LUMAJANG**

Oleh:

**Aini Masruroh
NIM. 111510601041**

Pembimbing,

Pembimbing Utama : Mustapit, SP., M.Si.
NIP. 197708162005011001

Pembimbing Anggota : Djoko Soejono, SP., MP.
NIP. 197001151997021002

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: “**Evaluasi Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) pada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Karang Makmur Lumajang**”, telah diuji dan disahkan oleh Fakultas pertanian pada:

Hari :
Tanggal : Mei 2016
Tempat : Fakultas Pertanian Universitas Jember

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Mustapit, SP., M.Si.
NIP. 197708162005011001

Djoko Soejono, SP., MP.
NIP. 197001151997021002

Penguji 1,

Penguji 2,

Lenny Widjyanthi, SP., M.Sc., Ph.D
NIP. 196812021994032001

Titin Agustina, SP., MP.
NIP. 198208112006041001

Mengesahkan
Dekan,

Dr. Ir. Jani Januar, M.T.
NIP. 195901021988031002

RINGKASAN

Evaluasi Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) pada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Karang Makmur Lumajang. Aini Masruroh. 111510601041. Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember.

Gapoktan Karang Makmur merupakan gapoktan pengelola dan pelaksana program PUAP di Desa Karangbendo Kabupaten Lumajang. Program PUAP mulai dilaksanakan pada Januari 2013 hingga saat ini. Sejak pelaksanaan program PUAP oleh Gapoktan Karang Makmur belum pernah dilakukan evaluasi. Evaluasi program pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP) pada gabungan kelompok tani (Gapoktan) Karang Makmur perlu dilakukan mengingat evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana indikator kinerja dan keberhasilan program tercapai.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui kinerja Gapoktan Karang Makmur sebagai lembaga pengelola program PUAP di Desa Karangbendo Kabupaten Lumajang (2) mengetahui pengelolaan program PUAP di Desa Karangbendo Kabupaten Lumajang. *Purposive method* digunakan untuk menentukan daerah penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Penentuan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* dan *proportionate random sampling*. *Purposive sampling* digunakan untuk pengambilan sampel kunci pelaksana program PUAP di tingkat desa yaitu ketua gapoktan, manajer LKMA, kasir LKMA dan penyuluh. *Proportionate random sampling* digunakan untuk menentukan responden dari anggota Gapoktan Karang Makmur. Metode analisis data yang digunakan yaitu metode skoring melalui skala rating (*rating scale*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kinerja Gapoktan Karang Makmur sebagai pengelola program PUAP di Desa Karangbendo Kabupaten Lumajang berada pada kategori baik; (2) Pengelolaan program PUAP di Desa Karangbendo Kabupaten Lumajang berlangsung baik, namun untuk mencapai keberhasilan outcome program PUAP sebagaimana disebutkan dalam pedoman umum PUAP masih belum dapat direalisasikan secara keseluruhan.

SUMMARY

The Evaluation of Implementation of Rural Agribusiness Development (PUAP) Program on Farmers Group Association (Gapoktan) Karang Makmur Lumajang. Aini Masruroh. 111510601041. Study Program of Agribusiness, Faculty of Agriculture, University of Jember.

Gapoktan Karang Makmur was the gapoktan that became manager and executive PUAP program in Karangbendo Village, Lumajang Regency. PUAP program was commenced in January 2013 to the present. Since the implementation of the PUAP program by Gapoktan Karang Makmur had never been evaluated. Evaluation of Implementation of Rural Agribusiness Development (PUAP) Program on Farmers Group Association (Gapoktan) Karang Makmur was needed because the evaluation was conducted to determine the extent of performance indicators and success of the program is reached.

This research aimed to (1) determining the performance of Gapoktan Karang Makmur as manager of the PUAP program in the Karangbendo village, Lumajang (2) knowing the management PUAP program in the Karangbendo village, Lumajang. The purposive method was used to determine the area of research. The research method that was used was the descriptive quantitative method. Sampling was done using purposive sampling and proportionate random sampling. Purposive sampling used for sampling PUAP program implementers key at the village, they were a chairman of gapoktan, LKMA manager, LKMA cashier and instructor. Proportionate random sampling was used to determine the respondents of Gapoktan Makmur members. Methods of data analysis that was used were the method of scoring through the rating scale.

The results showed that (1) the performance Gapoktan Karang Makmur as a PUAP program manager in Karangbendo Village, Lumajang were in well categories; (2) The management of PUAP program in Karangbendo Village, Lumajang was going well, but in order to achieve successful outcomes PUAP program as was mentioned in the general guidelines PUAP was still could not be realized in its entirety.

PRAKATA

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Evaluasi Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) pada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Karang Makmur Lumajang”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata satu (S1), pada Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Program Studi Agribisnis pada Fakultas Pertanian Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Dr. Ir. Jani Januar, MT., selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Jember yang telah memberikan bantuan perijinan dalam menyelesaikan karya tulis ini.
2. Dr. Ir. Joni Murti Mulyo Aji, M. Rur. M., selaku Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian/Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember yang telah memberikan bantuan sarana dan prasarana dalam menyelesaikan karya tulis ini.
3. Mustapit, SP., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Utama, Djoko Soejono, SP., MP., selaku Dosen Pembimbing Anggota, serta Lenny Widjyanthi, SP., M.Sc., Ph.D dan Titin Agustina, SP., MP., selaku Dosen Penguji yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, nasihat, pengalaman, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini.
4. Dra. Sofia, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan nasihat selama masa studi.
5. Ayahku Muhiyi, Ibuku Nurul Qomariyah, dan Kakakku Arif Harun Alrosyid, S.Pd. atas seluruh kasih sayang, motivasi, tenaga, materi, dan do'a yang tiada henti selalu diberikan dengan tulus dan ikhlas dalam setiap usahaku selama menyelesaikan karya tulis ini.

6. Ketua Gapoktan Karang Makmur, Aparat Desa Karangbendo, PPL dan pengelola LKMA, yang telah mendukung dan membantu selama pencarian data penelitian di Desa Karangbendo hingga menghasilkan karya tulis ini.
7. Cut Intan M.A., Elin Dwi Cahyani, Antika Fahriatul F., Sri wulandari, Yolanda Agustin dan seluruh teman-teman di Program Studi Agribisnis atas semua bantuan dan kebersamaan selama menjadi mahasiswa.
8. UKSM Panjalu yang telah menjadi keluarga dan telah memberikan waktu, hiburan, motivasi dan pengalaman yang sangat berharga selama menjadi mahasiswa.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang selalu memberikan semangat selama studi sampai selesai penulisan karya tulis ini.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu diharapkan adanya kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tulisan ini. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, Mei 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBINGAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	viii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan dan Manfaat	4
1.3.1 Tujuan	4
1.3.2 Manfaat	4
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Penelitian Terdahulu	5
2.2 Program PUAP	7
2.3 Klasifikasi Gapoktan PUAP	9
2.4 Landasan Teori dan Konsep	11
2.4.1 Teori Perubahan Sosial	11
2.4.2 Konsep Gapoktan.....	13

2.4.3 Konsep Penilaian Kinerja	14
2.4.4 Kinerja Gapoktan PUAP.....	16
2.4.5 Konsep Evaluasi Program.....	19
2.4.6 Evaluasi Program PUAP.....	22
2.5 Kerangka Pemikiran	25
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	29
3.1 Penentuan Daerah Penelitian	29
3.2 Metode Penelitian	29
3.3 Metode Pengambilan Sampel	30
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	31
3.5 Metode Analisis Data.....	32
3.6 Definisi Operasional	34
BAB 4. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN.....	36
4.1 Gambaran Umum Desa Karangbendo	36
4.1.1 Letak dan Keadaan Wilayah.....	36
4.1.2 Keadaan Penduduk	36
4.1.2.1 Keadaan Penduduk Menurut Jenis Kelamin	36
4.1.2.2 Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	37
4.1.2.3 Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian ...	38
4.1.3 Kondisi Sosial.....	39
4.2 Sejarah Pembentukan Gapoktan Karang Makmur.....	40
4.3 Program Pembangunan di Desa Karangbendo	43
4.4 Program PUAP	45
BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	47
5.1 Kinerja Gapoktan Karang Makmur sebagai Lembaga Pengelola Program PUAP	47
5.1.1 Pencatatan dan Pembukuan	49
5.1.2 Penyaluran untuk Usaha Pertanian	51

5.1.3 Pembiayaan kepada Petani Miskin	53
5.1.4 Pengendalian Penyaluran Dana	55
5.1.5 Pembinaan Usaha Anggota.....	57
5.1.6 Analisa Kelayakan Usaha Anggota	60
5.1.7 Mekanisme Insentif dan Sanksi	62
5.1.8 Sarana dan Prasarana LKMA	65
5.1.9 Pelaporan	66
5.1.10 Pengawasan Pembiayaan	68
5.2 Pengelolaan Program PUAP	70
5.2.1 Peningkatan Kemampuan Gapoktan dalam Mengelola Bantuan Modal Usaha untuk Petani Anggota	71
5.2.2 Peningkatan Jumlah Petani dan Rumah Tangga Tani yang Mendapatkan Bantuan Modal Usaha.....	74
5.2.3 Peningkatan Kegiatan Usaha Agribisnis (Hulu, Budidaya dan Hilir) di Perdesaan	77
BAB 6. SIMPULAN DAN SARAN.....	80
6.1 Simpulan	80
6.2 Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
3.1	Penentuan Sampel Pada Masing-Masing Kelompok Tani.....	31
4.1	Jumlah Penduduk Desa Karangbendo Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang Menurut Jenis Kelamin Tahun 2011	37
4.2	Jumlah Penduduk Desa Karangbendo Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2011.....	37
4.3	Jumlah Penduduk Desa Karangbendo Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang Menurut Mata Pencaharian Tahun 2011.....	38
5.1	Penilaian Kinerja Gapoktan Karang Makmur Desa Karangbendo Kabupaten Lumajang Tahun 2015	48
5.2	Asset Gapoktan Karang Makmur Desa Karangbendo Kabupaten Lumajang Tahun 2015.....	72
5.3	Sisa Hasil Usaha (SHU) Gapoktan Karang Makmur Desa Karangbendo Kabupaten Lumajang Tahun 2015	73
5.4	Peningkatan Jumlah Petani Penerima Dana BLM PUAP Gapoktan Karang Makmur Desa Karangbendo Kabupaten Lumajang Tahun 2015	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
2.1	Skema Kerangka Pemikiran	28
4.1	Struktur Organisasi Gapoktan Karang Makmur	42
5.1	Grafik Penilaian Pencatatan dan Pembukuan	50
5.2	Grafik Penilaian Penyaluran untuk Usaha Pertanian.....	51
5.3	Grafik Penilaian Pembiayaan kepada Petani Miskin.....	54
5.4	Grafik Penilaian Pengendalian Penyaluran Dana	55
5.5	Grafik Penilaian Pembinaan Usaha Anggota	58
5.6	Grafik Penilaian Analisa Kelayakan Usaha Anggota.....	60
5.7	Grafik Penilaian Mekanisme Insentif dan Sanksi.....	62
5.8	Grafik Penilaian Sarana dan Prasarana.....	65
5.9	Grafik Penilaian Pelaporan	67
5.10	Grafik Penilaian Pengawasan Pembiayaan.....	69

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul	Halaman
A	Data Responden Petani Anggota Gapoktan Karang Makmur di Desa Karangbendo Kabupaten Lumajang ...	83
A1	Lanjutan Data Responden Petani Anggota Gapoktan Karang Makmur di Desa Karangbendo Kabupaten Lumajang	84
A2	Lanjutan Data Responden Petani Anggota Gapoktan Karang Makmur di Desa Karangbendo Kabupaten Lumajang	85
A3	Lanjutan Data Responden Petani Anggota Gapoktan Karang Makmur di Desa Karangbendo Kabupaten Lumajang	86
B	Hasil Perhitungan Indikator Kinerja Gapoktan Karang Makmur oleh Anggota	87
B1	Lanjutan Hasil Perhitungan Indikator Kinerja Gapoktan Karang Makmur oleh Anggota	88
B2	Hasil Perhitungan Indikator Kinerja Gapoktan Karang Makmur oleh Pengelola LKMA	88
C	Penilaian Kinerja Gapoktan Karang Makmur Desa Karangbendo Kabupaten Lumajang Tahun 2015	89
D	Penilaian Pencatatan dan Pembukuan	90
E	Penilaian Penyaluran untuk Usaha Pertanian	90
F	Pekerjaan Anggota Penerima Bantuan Modal Usaha Dana PUAP Gapoktan Karang Makmur	90
G	Penilaian Pembiayaan kepada Petani Miskin	90
H	Luas Lahan Anggota Penerima Bantuan Modal Usaha Dana PUAP Gapoktan Karang Makmur	91
I	Penilaian Pengendalian Penyaluran Dana	91

Lampiran	Judul	Halaman
J	Penilaian Pembinaan Usaha Anggota.....	91
K	Penilaian Analisa Kelayakan Usaha Anggota	91
L	Penilaian Mekanisme Insentif dan Sanksi	92
M	Penilaian Sarana dan Prasarana LKMA	92
N	Inventaris Gapoktan Karang Makmur	92
O	Penilaian Pelaporan	93
P	Penilaian Pengawasan Pembiayaan	93
Q	Tahap Pencairan dana BLM PUAP Gapoktan Karang Makmur	94
R	Jumlah Petani Anggota Penerima Dana BLM PUAP	94
S	Kuesioner.....	95
T	Dokumentasi.....	106

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertanian merupakan sektor terbesar dalam hampir setiap ekonomi negara berkembang, termasuk Indonesia. Indonesia merupakan negara agraris yang kaya akan hasil pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Kondisi alam tersebut memberikan peluang bagi sebagian besar masyarakat Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pertanian maupun yang berkaitan dengan pertanian. Sektor pertanian mampu menyerap tenaga kerja, sehingga pembangunan sektor pertanian akan membantu mengatasi masalah pengangguran, meningkatkan perekonomian dan sekaligus pengentasan kemiskinan. Akan tetapi, kenyataan yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa terjadi ketidaksesuaian dimana sektor pertanian yang dapat menyerap tenaga kerja justru semakin terabaikan dibandingkan sektor yang lain seperti sektor industri. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data jumlah penduduk miskin tahun 2013 sebanyak 28,55 juta orang, dimana sebagian besar yaitu 17,92 juta orang tinggal di perdesaan yang secara implisit menunjukkan bahwa tingkat produktivitas yang rendah serta penerimaan pendapatan yang rendah terjadi di sektor pertanian sehingga menyebabkan jumlah penduduk miskin di perdesaan lebih besar dari perkotaan (BPS, 2013).

Kemiskinan di perdesaan akan terus menjadi masalah pokok nasional sehingga penanggulangan kemiskinan tetap menjadi program prioritas untuk tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Oleh karena itu pembangunan ekonomi nasional berbasis pertanian dan perdesaan secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada pengurangan penduduk miskin. Permasalahan mendasar yang dihadapi petani adalah kurangnya akses kepada sumber permodalan, pasar dan teknologi serta organisasi tani yang masih lemah. Oleh karena itu program penanggulangan kemiskinan merupakan bagian dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan kesepakatan global untuk mencapai Tujuan Millennium (Permentan, 2015).

Kementerian Pertanian mulai tahun 2008 telah melaksanakan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di bawah koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) dan berada dalam kelompok program pemberdayaan masyarakat. Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) merupakan bentuk fasilitasi bantuan modal usaha bagi petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani yang dikoordinasikan oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Gapoktan merupakan kelembagaan tani pelaksana PUAP untuk penyaluran bantuan modal usaha bagi anggota. Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan PUAP, gapoktan didampingi oleh tenaga pendamping PUAP yaitu penyuluh.

Program PUAP bertujuan: Pertama, untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di perdesaan sesuai dengan potensi wilayah. Kedua, meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, Pengurus Gapoktan dan Penyuluh. Ketiga, memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis. Keempat, meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan (Permentan, 2015).

Sebaran lokasi PUAP meliputi 33 provinsi, 417 kabupaten atau kota, 3.410 kecamatan dan 20.426 desa (Kementerian Pertanian, 2010). Salah satu propinsi yang memperoleh PUAP adalah Jawa Timur. Dana PUAP ini dialokasikan ke 38 kabupaten/kota, 662 kecamatan yang ada di Provinsi Jawa Timur. Untuk Kabupaten Lumajang sendiri terdapat 21 kecamatan yang menerima bantuan dana PUAP. Salah satu kecamatan yang menerima dana PUAP adalah Kecamatan Tekung.

Sektor pertanian di Kabupaten Lumajang memegang peranan sangat penting mengingat luasnya lahan pertanian yang dimiliki dan juga sebagian besar wilayah di Kabupaten Lumajang masih tergolong desa yang menitik beratkan pada sektor pertanian terutama komoditi padi. Luas lahan yang digunakan untuk sawah tahun 2013 seluas 72.552 Ha. Adapun produksi padi tahun 2013 sebanyak

387.168 ton (BPS, 2013). Salah satu Gapoktan PUAP yang ada di Kabupaten Lumajang adalah Gapoktan Karang Makmur. Gapoktan Karang Makmur terletak di Desa Karangbendo Kecamatan Tekung.

Sebagian besar penduduk Desa Karangbendo menggantungkan hidup pada sumber penghasilan dari sektor pertanian. Desa Karangbendo adalah salah satu dari 8 desa yang ada di Kecamatan Tekung yang berpotensi di bidang pertanian. Terdapat 6 kelompok tani yang terdiri dari Pasinan Muda I, Pasinan Muda II, Karya Harapan I, Karya Harapan II, Sekardangan dan Klapan Jati, dimana kelompok-kelompok tani tersebut tergabung dalam gabungan kelompok tani (GAPOKTAN) yang bernama Karang Makmur. Jumlah keseluruhan anggota kelompok tani berjumlah 793 orang. Jumlah masing-masing kelompok tani beranggotakan 60-185 orang, namun tidak semua anggota kelompok tani berperan aktif. Keaktifan kelompok tani masih dipengaruhi oleh ada tidaknya program yang datang dari pemerintah. Berbagai program yang telah dilaksanakan diantaranya adalah Program Sistem Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT), Program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Padi dan Jagung, Bantuan Langsung Pupuk (BLP), Bantuan Langsung berupa bangunan fisik yaitu jaringan irigasi dan jalan usaha tani dan bantuan langsung berupa modal yaitu bantuan dana PUAP.

1.2 Rumusan Masalah

PUAP merupakan bentuk fasilitasi bantuan modal usaha bagi petani anggota gapoktan, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani. Bantuan berupa modal usaha tersebut berlangsung hingga saat ini. Program ini bergulir pada Desember akhir tahun 2012 dan mulai dilaksanakan pencairan dana pada awal Januari 2013 yaitu tepatnya pada tanggal 8 Januari 2013. Program bantuan dana PUAP ini dikelola oleh pihak Gapoktan desa yaitu Gapoktan Karang Makmur. Adanya bantuan modal PUAP ini diharapkan dapat meringankan beban petani terutama dalam hal pemenuhan modal kerja bagi usahataniannya. Pemanfaatan dana PUAP oleh petani di Desa Karangbendo

digunakan untuk membeli sarana produksi pertanian yang meliputi bibit, pupuk, obat-obatan, benih dan biaya tenaga kerja.

Sejak pelaksanaan kegiatan Program PUAP tahun 2013 belum pernah dilakukan evaluasi. Mengingat upaya yang telah dilakukan untuk program ini, mulai dari perencanaan, pelaksanaan program dan dana yang dialokasikan, evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Program PUAP di Kabupaten Lumajang harus dilakukan untuk mengetahui sejauh mana indikator keberhasilan program tercapai. Berdasarkan latarbelakang tersebut, maka permasalahan yang diambil dalam penelitian ini mengenai:

1. Bagaimana kinerja Gapoktan Karang Makmur sebagai lembaga pengelola program PUAP di Desa Karangbendo Kabupaten Lumajang?
2. Bagaimana pengelolaan program PUAP di Desa Karangbendo Kabupaten Lumajang?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

1. Untuk mengetahui kinerja Gapoktan Karang Makmur sebagai lembaga pengelola program PUAP di Desa Karangbendo Kabupaten Lumajang.
2. Untuk mengetahui pengelolaan program PUAP di Desa Karangbendo Kabupaten Lumajang.

1.3.2 Manfaat

1. Bagi penulis untuk pengalaman dan wadah pelatihan dalam teori-teori serta aplikasi konsep-konsep ilmu yang diperoleh dalam bangku perkuliahan
2. Bagi Gapoktan, sebagai bahan masukan perbaikan terhadap perkembangan Gapoktan di Desa Karangbendo Kabupaten Lumajang.
3. Bagi Pemerintah khususnya Departemen Pertanian diharapkan dapat memperoleh masukan dan evaluasi dari penilaian pelaksanaan bantuan modal PUAP sehingga kedepannya program pemerintah lebih efisien dalam pelaksanaannya.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Fokus penelitian “Evaluasi Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) pada Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Karang Makmur Lumajang” adalah mengetahui kinerja Gapoktan Karang Makmur sebagai lembaga pelaksana program PUAP dan pelaksanaan program PUAP di Desa Karangbendo Kabupaten Lumajang. Beberapa penelitian terdahulu memiliki fokus permasalahan yang sejenis. Berikut diuraikan beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan fokus permasalahan pada penelitian ini.

Kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan. Kinerja gapoktan sebagai lembaga pelaksana dan pengelola program PUAP dinilai berdasarkan aspek manajemen pengelolaan LKMA. Penelitian Gerry (2012) dengan judul “Pengaruh Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan terhadap Produksi Padi di Desa Sruni Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember” menyebutkan bahwa kinerja pengurus Gapoktan sudah memadai, hal ini ditengarai bahwa ketua pengurus Gapoktan aktif menjadi wakil ketua 1 KTNA (Kontak Tani Nelayan Andalan) di Dinas Pertanian Kabupaten Jember dan Gapoktan mejalin kemitraan dengan PT. Asbes dalam rangka menyediakan kebutuhan obat-obatan dan kebutuhan saprodi lainnya dalam menjalankan usaha pertanian. Berdasarkan kenyataan ini peneliti menganggap bahwa potensi dan kinerja pengurus Gapoktan sudah memadai. Dinyatakan pula pada penelitian dengan judul “Keberadaan Modal Sosial dan Strategi Pengembangan terhadap Pengelolaan Dana PUAP Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember”, menyatakan bahwa pengelolaan program PUAP pada Gapoktan Mulyo Abadi hampir secara keseluruhan telah sesuai dengan pengelolaan berdasarkan LKMA pada juknis Deptan. Terdapatnya modal sosial yang terdiri dari kepercayaan, jaringan dan norma dalam pengelolaan PUAP mampu mengembangkan dana PUAP (Nyla, 2013).

Program PUAP memiliki indikator yang dijadikan sebagai tolak ukur berhasil tidaknya pelaksanaan program tersebut. Indikator yang digunakan adalah indikator keberhasilan *outcome*. Indikator keberhasilan *outcome* sebagaimana tercantum pada pedoman umum PUAP meliputi: meningkatnya kemampuan gapoktan dalam mengelola bantuan modal usaha, meningkatnya jumlah petani dan rumah tangga tani yang mendapatkan bantuan modal usaha dan meningkatnya kegiatan agribisnis (hulu, budidaya dan hilir) di perdesaan. Adanya bantuan program PUAP yang dilaksanakan diharapkan mampu mencapai indikator tersebut. Triane (2012), dalam judul penelitian “Analisis Dampak Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Studi Kasus Gapoktan Rukun Tani, Desa Citapen, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor” menyatakan bahwa pelaksanaan program PUAP di Gapoktan Rukun Tani telah berjalan baik. Hal ini dapat dilihat dari bertambahnya jumlah anggota yang menerima dana PUAP, Sisa Hasil Usaha (SHU) Tahun 2011 yang meningkat (10,37% dari dana awal PUAP), dan juga tingkat pengembalian kredit macet yang relative kecil (6,85% dari dana PUAP).

Penelitian lain yang juga memperkuat informasi mengenai keberhasilan program PUAP, dijelaskan oleh Hafinuddin (2013) dalam jurnalnya yang berjudul “Hubungan Dinamika Gapoktan dengan Keberhasilan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)”, bahwa Keberhasilan *outcome* program PUAP di Desa Kamurang berada pada kategori tinggi dengan persentase sebesar 75%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Gapoktan telah berhasil memberikan manfaat kepada anggota melalui peningkatan kemampuan Gapoktan dalam mengelola bantuan dan peningkatan jumlah petani yang memperoleh bantuan modal. Sebagian besar anggota berpendapat bahwa kemampuan Gapoktan dalam mengelola penyaluran bantuan sudah baik, hal ini dicirikan dengan penyaluran bantuan yang tepat sasaran. Sebagian besar bantuan yang telah disalurkan dapat dikembalikan lagi kepada Gapoktan. Selain itu, fasilitas penunjang usahatani yang dikelola oleh Gapoktan bertambah dibandingkan dengan tahun sebelumnya begitu pula dengan skala usaha yang dijalankannya.

Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan program harus dilakukan untuk mengetahui sejauh mana indikator keberhasilan program tercapai. Fatma (2012), dalam artikelnya dengan judul “Evaluasi Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Kabupaten Solok”, menyatakan bahwa Program PUAP di Kabupaten Solok telah mampu mengatasi kesulitan petani terhadap akses sumber permodalan serta telah berperan dalam pemberdayaan petani di Kabupaten Solok yang ditandai dengan adanya peningkatan pendapatan petani penerima manfaat, peningkatan jumlah petani penerima manfaat dan peningkatan fungsi Gapoktan sebagai wadah pemecahan masalah kesulitan modal petani. Gapoktan telah menjadi lembaga keuangan yang dimiliki dan dikelola petani sehingga petani tidak perlu susah untuk mencari modal untuk usahanya dengan syarat yang mudah dan tidak diperlukan jaminan.

2.2 Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)

Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) merupakan program terobosan Kementerian Pertanian untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengangguran. PUAP merupakan perekat bagi seluruh program Departemen Pertanian dan sektor lain yang terkait dalam program PNPM-Mandiri. PUAP merupakan bentuk fasilitasi bantuan modal usaha untuk petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani. PUAP dilaksanakan dengan fokus pada pemberdayaan untuk penanggulangan kemiskinan, mengembangkan potensi serta penguatan kapasitas kelompok masyarakat miskin khususnya petani diperdesaan.

Pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP) dilaksanakan melalui penyediaan dana penguatan modal usaha petani sebagai stimulan melalui koordinasi Gapoktan. Selama ini, permasalahan mendasar yang dihadapi petani adalah kurangnya akses sumber permodalan sebagai contoh petani tidak mempunyai sumber permodalan atau uang untuk membeli pupuk dan keperluan pertanian lainnya dalam hal pengolahan pertanian, serta kurangnya akses pada pemasaran hasil pertanian karena belum adanya mediator dalam kemitraan usaha hasil pemasaran dan penampungan hasil tunda jual para petani. Masalah lain yang

dihadapi petani yaitu organisasi tani yang masih lemah. Organisasi tani adalah gapoktan. Selama ini peran gapoktan masih sangat lemah karena belum adanya pelaksanaan tugas dari masing-masing pengurus gapoktan, sehingga gapoktan hanya sekedar ada dalam suatu Desa. Penyelesaian dalam permasalahan tersebut dibutuhkan program yang mampu memberdayakan sumber daya manusia (SDM) petani dan menyokong secara dana, maka program PUAP dibentuk dengan tujuan:

1. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di perdesaan dengan potensi wilayah.
2. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pelaku usaha agribisnis, pengurus Gapoktan, dan Penyuluh.
3. Memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis.
4. Meningkatkan fungsi kelembagaan petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan.

Sasaran PUAP yaitu berkembangnya usaha agribisnis di desa terutama desa miskin sesuai dengan potensi pertanian desa, berkembangnya gapoktan yang dimiliki dan dikelola oleh petani untuk menjadi kelembagaan ekonomi, meningkatnya kesejahteraan rumah tangga tani miskin, petani/peternak (pemilik dan atau penggarap) skala kecil, buruh tani dan berkembangnya usaha agribisnis petani yang mempunyai siklus usaha. Organisasi pelaksanaan PUAP dimulai dari tingkat pusat hingga tingkat desa. Pelaksana PUAP ditingkat desa yaitu meliputi pengurus gapoktan didampingi oleh penyuluh dan komite pengarah (wakil tokoh masyarakat, wakil poktan dan penyuluh) yang dibentuk oleh kepala desa. Keberhasilan PUAP sangat ditentukan oleh kerjasama dan komitmen seluruh pemangku kepentingan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai dengan dukungan anggaran dari tingkat pusat sampai daerah.

2.3 Klasifikasi Gapoktan PUAP

Gapoktan merupakan kelembagaan ekonomi di perdesaan yang di dalamnya bergabung kelompok-kelompok tani. Gapoktan sebagai asset kelembagaan dari Kementerian Pertanian diharapkan dapat dibina dan dikawal selamanya oleh seluruh komponen masyarakat pertanian mulai dari Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota sampai Kecamatan untuk dapat melayani seluruh kebutuhan petani di perdesaan. Sebagai organisasi ekonomi milik petani di perdesaan, diharapkan gapoktan dapat melayani kebutuhan petani tentang pembiayaan. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/OT.160 /4/2007, telah memberikan arahan bahwa Gapoktan dapat melakukan fungsi-fungsi ekonomi antara lain: unit usaha pengolahan, unit usaha Saprodi, unit usaha Pemasaran, unit usaha Keuangan Mikro sesuai dengan kebutuhan dan harus disepakati oleh seluruh anggota gapoktan. Permentan Nomor 273 adalah aturan dasar pada Kementerian Pertanian untuk membangun kelembagaan tani berbasis Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dalam 1(satu) desa, diharapkan gapoktan dapat tumbuh menjadi organisasi tani yang kuat, mandiri sebagai basis pertumbuhan ekonomi perdesaan. PUAP merupakan program strategis Kementerian Pertanian telah menetapkan Gapoktan sebagai pelaksana dan pengelola dana bantuan modal untuk dimanfaatkan membiayai usaha tani anggota secara berkelanjutan. Untuk itu gapoktan pelaksana program PUAP dapat diklasifikasikan sebagai dasar pembinaan organisasi lebih lanjut dalam 3 (tiga) strata yaitu :

1. Gapoktan Pemula

Gapoktan yang baru dibentuk dan dipersiapkan oleh tim teknis kabupaten/kota untuk melaksanakan program PUAP. Sebagai program pemberdayaan Kementerian Pertanian telah melakukan pelatihan kepada pengurus dan pengelola gapoktan. Setelah pelatihan maka dilakukan pendampingan oleh Penyuluh dengan maksud dan harapan dana penguatan modal usaha PUAP yang diterima oleh Gapoktan dapat dikelola oleh pengurus untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan petani. Ciri-ciri dasar gapoktan yang dapat diklasifikasikan sebagai gapoktan pemula yang baik antara lain:

- a. Gapoktan dapat mengkoordinasikan anggota untuk memanfaatkan dana penguatan modal usaha PUAP dalam membiayai usaha produktif sesuai dengan usulan dan penyaluran dana telah sesuai dengan Rencana Usaha Bersama (RUB).
- b. Seluruh anggota sepakat untuk menggulirkan dana dalam bentuk simpan pinjam, serta mempunyai aturan yang disepakati dan diikuti oleh seluruh anggota, namun tidak maksimal dalam mengorganisir dana masyarakat dalam rangka penambahan asset.

2. Gapoktan Madya

Gapoktan Madya merupakan gapoktan pemula yang dibina dan didampingi secara baik oleh tim teknis kabupaten/kota sehingga dapat meningkatkan tingkat keswadayaan kepengurusan dan organisasi serta dana sehingga sudah dapat diproyeksikan pada tahun ke 3 menjadi LKM sesuai struktur kebijakan program PUAP. Ciri-ciri dasar gapoktan yang dapat diklasifikasikan sebagai gapoktan Madya antara lain :

- a. Adanya kesungguhan anggota dan pengurus untuk mengoptimalkan kinerja organisasi dan meningkatkan akumulasi dana keswadayaan dana dari anggota dan meningkatkan laba dari operasional dana bantuan modal usaha PUAP.
- b. Gapoktan telah dapat membagi struktur kepengurusan khusus mengelola dana dalam format simpan pinjam.

3. Gapoktan Utama

Gapoktan Utama adalah gapoktan yang sudah mengelola dan menjaga perguliran dana BLM PUAP serta dana keswadayaan (simpanan anggota) dalam format Usaha Simpan Pinjam (U S/P). Gapoktan Utama yang akan ditumbuhkan menjadi LKM-A diharapkan dapat meningkatkan akumulasi dana sebagai modal dari dana keswadayaan anggota melalui tabungan dan saham anggota. Ciri-ciri dasar gapoktan yang dapat diklasifikasikan sebagai gapoktan utama antara lain:

- a. Gapoktan secara reguler dan konsisten telah melaksanakan rapat anggota
- b. Sudah membagi kepengurusan unit LKM pada gapoktan dan kepengurusan sebagai pengelola gapoktan
- c. Sudah memiliki aturan organisasi AD/ART

- d. Memiliki pencatatan/pembukuan dan manajemen yang baik
- e. Sudah menerapkan pola dan sistem pelayanan anggota
- f. Memiliki dana keswadayaan yang tumbuh secara progresif
- g. Sudah memiliki kantor pelayanan sebagai bagian dari sentra pelayanan anggota (sewa/milik sendiri)
- h. Sudah dapat meningkatkan jumlah dana yang dikelola saat ini terdiri dari dana PUAP, Simpanan sukarela, Simpanan (pokok, wajib, saham) dan dari laba/ keuntungan usaha.

2.4 Landasan Teori dan Konsep

2.4.1 Teori Perubahan Sosial

Pandangan Parsons (dalam Martono, 2012) mengenai perubahan sosial pada awalnya difokuskan pada sifat struktur sosial yang mengarah pada proses evolusi sosial. Menurut Parsons, studi mengenai perubahan sosial harus dimulai dengan studi mengenai struktur sosial terlebih dahulu. Struktur sosial dapat didefinisikan sebagai tatanan atau susunan sosial yang membentuk kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat yang dapat tersusun secara vertikal maupun horizontal. Secara lebih spesifik, pandangan Parsons mengacu pada dinamika yang terjadi dalam sistem sosial sebagai bagian dalam struktur sosial. Sistem sosial menurut Parsons terdiri atas sejumlah aktor individual yang saling berinteraksi dalam situasi yang sekurang-kurangnya mempunyai aspek lingkungan atau fisik, aktor-aktor yang memiliki motivasi, dalam arti memiliki kecenderungan untuk mengoptimalkan kepuasan yang berhubungan dengan situasi yang didefinisikan dan dimediasi dalam simbol bersama yang terstruktur secara kultural.

Menurut Parsons (dalam Martono, 2012), agar sistem sosial dapat bekerja dengan baik, setidaknya harus ada empat fungsi yang harus terintegasi, yaitu: 1). *Adaptation*, dimana sistem harus dapat beradaptasi dengan cara menanggulangi situasi eksternal yang kompleks dan sistem harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk kebutuhannya. 2). *Goal attainment*, dimana sistem harus dapat mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. 3). *Integration*, dimana sistem

harus mampu mengatur dan menjaga hubungan-hubungan yang menjadi komponennya. 4). *Latent pattern maintenance*, dimana sistem harus mampu memelihara dan memperbaiki motivasi pola-pola individu dan kultural. Keempat fungsi tersebut menurut Parsons merupakan fungsi *imperative* atau prasyarat berlangsungnya sistem sosial.

Proses perubahan dalam suatu kelompok masyarakat tidak terlepas dari bentuk penyikapan individu atau kelompok sosial dalam menerima adanya suatu perubahan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam proses perubahan adalah melalui pemberdayaan masyarakat. Menurut Ife (dalam Martono, 2012) mendefinisikan konsep pemberdayaan masyarakat sebagai proses menyiapkan masyarakat dengan berbagai sumberdaya, kesempatan, pengetahuan, dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri.

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan seseorang khususnya kelompok yang rentan dan lemah sehingga mereka mewakili kekuatan atau kemampuan dalam beberapa hal. Pertama, memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga mereka memiliki kebebasan (bebas mengemukakan pendapat, bebas dari kelaparan dan bebas dari kebodohan). Kedua, menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya serta memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka perlukan. Ketiga, berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka (Suharto dalam Martono, 2012). Proses pemberdayaan juga dapat terjadi akibat adanya faktor struktur peluang yang meliputi akses informasi, tingkat partisipasi, akuntabilitas dan kapasitas organisasi lokal. Pemanfaatan berbagai faktor tersebut secara maksimal menciptakan peningkatan keberdayaan baik pada tingkat individu maupun kolektif dan kemampuan ini pada gilirannya akan dapat meningkatkan penguatan lembaga lokal dalam meraih berbagai hasil seperti peningkatan kesejahteraan anggota (Martono, 2012).

2.4.2 Konsep Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sebagai organisasi petani di perdesaan yang dibentuk secara musyawarah dan mufakat untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Gapoktan dibentuk atas dasar: (1) kepentingan yang sama diantara para anggotanya; (2) berada pada kawasan usahatani yang menjadi tanggung jawab bersama diantara para anggotanya; (3) Mempunyai kader pengelola yang berdedikasi untuk menggerakkan para petani; (4) memiliki kader atau pemimpin diterima oleh petani lainnya; (5) Mempunyai kegiatan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar anggotanya, dan (6) adanya dorongan atau motivasi dari tokoh masyarakat setempat (Kementerian Pertanian, 2010). Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang Pedoman pembinaan kelembagaan petani, pembinaan kelompok tani diarahkan pada penerapan sistem agribisnis, peningkatan peranan, peran serta petani dan anggota masyarakat perdesaan untuk menggalang kepentingan bersama secara kooperatif agar kelompok tani lebih berdaya guna dan berhasil guna, dalam penyediaan sarana produksi pertanian, permodalan, peningkatan atau perluasan usaha tani di sektor hulu dan hilir, pemasaran serta kerjasama dalam peningkatan posisi tawar. Fungsi Gabungan Kelompok tani, yaitu:

a. Unit Usaha Penyedia Sarana Produksi

Gabungan kelompok tani merupakan tempat pemberian layanan kepada seluruh anggota untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi (pupuk termasuk pupuk bersubsidi, benih bersertifikat, pestisida, dll) dan alat mesin pertanian, baik yang berdasarkan kredit/permodalan usahatani bagi anggota kelompok tani yang memerlukan maupun dari swadana petani/sisa hasil usaha.

b. Unit Usaha tani

Gabungan kelompok tani dapat menjadi unit yang memproduksi komoditas untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dan kebutuhan pasar sehingga dapat menjamin kuantitas, kualitas dan kontinuitas serta stabilitas harga.

c. Unit Usaha Pengolahan

Gabungan kelompok tani dapat memberikan pelayanan baik berupa penggunaan alat mesin pertanian maupun teknologi dalam pengolahan hasil produksi komoditas yang mencakup proses pengolahan, sortasi/grading dan pengepakan untuk meningkatkan nilai tambah produk.

d. Unit Usaha Pemasaran

Gabungan kelompok tani dapat memberikan pelayanan/fasilitasi pemasaran hasil pertanian anggotanya baik dalam bentuk pengembangan jejaring dan kemitraan dengan pihak lain maupun pemasaran langsung. Dalam pengembangannya gapoktan dapat memberikan pelayanan informasi harga komoditas, agar gapoktan tumbuh dan berkembang menjadi usahatani yang mandiri sehingga dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan serta kehidupan yang lebih baik bagi anggotanya.

e. Unit Usaha Keuangan Mikro

Gabungan kelompok tani dapat memberikan pelayanan permodalan bagi anggota, baik yang berasal dari iuran dan/atau simpan-pinjam anggota serta sisa hasil usaha, maupun dari perolehan kredit melalui perbankan, mitra usaha, atau bantuan pemerintah dan swasta.

2.4.3 Konsep Penilaian Kinerja

Kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan perusahaan adalah dengan cara melihat hasil penilaian kerja. Sasaran yang menjadi objek penilaian kinerja adalah kecakapan, kemampuan karyawan dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas yang dievaluasi dengan menggunakan tolok ukur tertentu secara objektif dan dilakukan secara berkala. Dari hasil penilaian dapat dilihat kinerja perusahaan yang dicerminkan oleh kinerja karyawan atau dengan kata lain, kinerja merupakan hasil kerja konkret yang dapat diamati dan dapat diukur (Riva'i, 2004).

Penilaian kinerja mengacu pada suatu sistem formal dan terstruktur yang digunakan untuk mengukur, menilai dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, perilaku dan hasil termasuk tingkat ketidakhadiran. Suatu perusahaan melakukan penilaian kinerja didasarkan pada dua alasan pokok, yaitu: evaluasi yang objektif terhadap kinerja karyawan untuk membuat keputusan dan alat yang memungkinkan untuk membantu karyawannya memperbaiki kinerja, merencanakan pekerjaan, serta mengembangkan kemampuan dan ketrampilan untuk perkembangan karier (Riva'i, 2004).

Penilaian dilaksanakan tidak hanya sekedar untuk mengetahui kinerja yang lemah, hasil yang baik dan bisa diterima juga harus diidentifikasi sehingga dapat dipakai untuk penilaian lainnya. Untuk itu dalam penilaian kinerja perlu memiliki ukuran kinerja. Evaluasi kinerja juga memerlukan ukuran/ standar kinerja yang dapat diandalkan yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja. Teknik penilaian kinerja atau prestasi yang paling tua dan paling banyak digunakan adalah skala peringkat (*rating scale*), dimana para penilai diharuskan melakukan suatu penilaian yang berhubungan dengan hasil kerja karyawan dalam skala-skala tertentu, mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Dengan mengevaluasi prestasi kinerja maka dapat diperoleh umpan balik dari upaya-upaya mereka. Umpan balik ini selanjutnya bisa mengarah kepada perbaikan-perbaikan prestasi (Riva'i, 2004).

Penilaian keberhasilan kinerja suatu lembaga dapat mengacu pada pencapaian sasaran dan tujuan. Kinerja kelembagaan didefinisikan sebagai kemampuan suatu kelembagaan untuk menggunakan sumberdaya yang dimiliki secara efisien dan menghasilkan output yang sesuai dengan tujuannya dan relevan dengan kebutuhan pengguna. Syahyuti (2004) merinci dari Mackay *et al.* (1998), terdapat dua hal pokok yang harus diperhatikan dalam memahami kinerja kelembagaan dalam mencapai tujuan-tujuannya yakni efisiensi penggunaan sumberdaya dan keberlanjutan kelembagaan berinteraksi dengan para kelompok kepentingan di luarnya.

2.4.4 Kinerja Gapoktan PUAP

Kinerja Gapoktan PUAP dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengelola dan menyalurkan dana PUAP. Pola pengelolaan keuangan ditingkat gapoktan PUAP oleh pengurus dijadikan sebagai acuan dalam pengelolaan program PUAP menuju pembentukan LKMA. Adapun kinerja gapoktan sebagai lembaga pengelola program PUAP dinilai berdasarkan aspek manajemen pengelolaan LKMA. Sejalan dengan kebijakan pola pembinaan Gapoktan PUAP berkelanjutan, maka aspek penilaian manajemen pengelolaan LKMA adalah sebagai berikut:

1. Penyaluran untuk usaha pertanian

PUAP merupakan program terobosan untuk pembiayaan usaha ekonomi produktif pertanian, dalam upaya mengembangkan dan mendukung 4 (empat) program prioritas Kementerian Pertanian yaitu: swasembada dan swasembada berkelanjutan; diversifikasi pangan; nilai tambah, daya saing dan ekspor; serta peningkatan kesejahteraan petani. Berkaitan dengan hal tersebut dana PUAP harus dikelola untuk pembiayaan usaha ekonomi produktif dan terus berkembang sesuai dengan prinsip pemberdayaan untuk disalurkan kepada usaha pertanian anggota.

2. Pembiayaan kepada petani miskin

Sebagai kelompok program pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan PNPM-Mandiri, Gapoktan penerima BLM PUAP harus dapat menyalurkan dana PUAP kepada petani yang selama ini tidak pernah bisa akses kepada sumber pembiayaan perbankan. Petani skala mikro/miskin di perdesaan merupakan petani gurem yang selama ini hampir dipastikan tidak masuk dalam skenario untuk dibiayai oleh perbankan. Petani gurem merupakan rumah tangga pertanian pengguna lahan yang menguasai lahan kurang dari 0,5 ha (Sensus Pertanian, 2003). Petani miskin tidak mempunyai agunan dan hasil usaha cenderung secara maksimal untuk dikonsumsi, untuk itu LKMA harus dapat mengambil peran untuk membiayai usaha yang dilakukan oleh petani miskin tersebut.

3. Pengendalian penyaluran dana

Gapoktan sebagai lembaga ekonomi difungsikan untuk memberikan pelayanan keuangan, penyediaan saprodi, pemasaran hasil pertanian anggota dan lain lain. Untuk memastikan tingkat akuntabilitas pengelolaan aset, maka gapoktan harus mempunyai sistem pengendalian yang baik. Pengendalian penyaluran dana/pembiayaan kepada anggota dilakukan oleh pengelola LKMA dengan membentuk komite pembiayaan yang bertujuan untuk mengawasi dan mengendalikan total dan kualitas pembiayaan kepada anggota.

4. Pencatatan dan pembukuan

Keteraturan pembukuan dan manajemen keuangan yang dilakukan oleh pengurus Gapoktan PUAP dapat menggambarkan bahwa: (1) seluruh kebijakan pengelolaan keuangan di tingkat LKM (bendahara) telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan; (2) seluruh transaksi keuangan telah dicatat dan dilakukan sesuai dengan prinsip dasar manajemen keuangan; (3) seluruh transaksi keuangan dicatat dan dilaporkan tepat waktu dan layak. Sebagai organisasi yang mengelola dana PUAP dan dana keswadayaan masyarakat, maka penilaian kinerja tentang pencatatan dan pembukuan Gapoktan yang diwujudkan dalam bentuk neraca dan laporan rugi/laba) digunakan sebagai alat ukur utama untuk menentukan klasifikasi Gapoktan sebagai LKMA.

5. Analisa kelayakan usaha anggota

Analisis kelayakan usaha anggota sebelum diberikan pembiayaan ditujukan untuk: a) memperkecil risiko pembiayaan; b) memastikan ketepatan sasaran pembiayaan; dan c) menjaga kelangsungan hidup usaha LKMA. Analisis kelayakan usaha untuk pembiayaan dilakukan oleh pengurus LKMA dengan memperhatikan aspek-aspek: peluang pasar, tingkat keuntungan, kebutuhan modal riil yang perlu dicukupi dari pembiayaan LKMA dan kemampuan membayar kembali.

6. Pelaporan

Pelaporan merupakan bentuk pertanggung jawaban pengelola LKMA dalam mengelola dana PUAP dan dana keswadayaan masyarakat secara transparan dan akuntabel. Pelaporan pelaksanaan dana PUAP dilakukan secara

berkesinambungan dari pengelola kepada pengurus dan anggota yang tergabung dalam gapoktan.

7. Pembinaan usaha anggota

Pembinaan usaha anggota dilakukan dalam rangka menjaga keterjaminan proses pengembalian pembiayaan dari anggota. Pembinaan usaha kepada anggota harus menjadi perhatian penting dari petugas LKMA karena dana di LKMA merupakan dana umat bukan dana milik sendiri. Pembinaan usaha anggota dimaksudkan supaya bantuan modal/pembiayaan yang diberikan LKMA dinilai dapat meningkatkan omset usaha calon debitur sekaligus menaikkan pendapatannya.

8. Pengawasan pembiayaan

Pengawasan pembiayaan dilakukan oleh pengelola LKMA kepada petani anggota yang sudah melakukan akad kredit/pembiayaan dengan LKMA. Pengawasan pembiayaan dimaksudkan untuk pengawalan dana sehingga dapat bermanfaat sesuai usulan dan petani mampu mengembalikannya. Pengawasan pembiayaan juga dimaksudkan untuk melakukan pembinaan teknis dan karakter dari petani anggota sebagai penerima manfaat.

9. Mekanisme insentif dan sanksi

Mekanisme insentif dan sanksi merupakan metode pembinaan karakter sehingga anggota yang meminjam dapat mengembalikan secara teratur dan disiplin. Disamping itu diharapkan juga dapat terjalin hubungan yang baik antara pengelola LKMA dan anggota. Insentif dan sanksi harus dapat dilakukan secara konsisten oleh pengelola kepada anggota yang melakukan transaksi pinjaman, supaya tidak terjadi distorsi dalam implementasi kebijakan yang pada akhirnya juga akan berdampak terhadap LKMA.

10. Sarana dan prasarana LKMA

Kantor pelayanan untuk anggota/masyarakat yang standar dan memenuhi syarat sudah menjadi keharusan dan penting bagi gapoktan PUAP menuju lembaga keuangan mikro. Penampilan kantor harus dapat menunjukkan dan meyakinkan petani/masyarakat sebagai nasabah penabung atau yang akan mempercayakan dananya dikelola oleh gapoktan dan dapat menghasilkan laba.

Sarana dan prasarana kantor/tempat usaha dan pelayanan anggota, termasuk penampilan pengelola LKM sehari-hari dalam melayani anggota, fasilitas buku tabungan dan pinjaman anggota serta fasilitas lain menjadi pelengkap utama Gapoktan sebagai LKMA. Identifikasi sarana dan prasarana administrasi perkantoran menurut Mulyani (2008) dapat dikelompokkan menjadi:

1. Peralatan/perengkapan kantor

Peralatan/perengkapan adalah alat atau bahan yang digunakan untuk membantu pelaksanaan pekerjaan kantor, sehingga menghasilkan suatu pekerjaan yang diharapkan selesai lebih cepat, lebih tepat dan lebih baik. Dilihat dari bentuknya, peralatan/perengkapan kantor dibedakan menjadi tiga, yaitu: peralatan/perengkapan kantor berbentuk lembaran, peralatan/perengkapan kantor berbentuk nonlembaran dan peralatan/perengkapan kantor berbentuk buku.

2. Mesin-mesin kantor

Mesin-mesin kantor adalah alat yang digunakan untuk menghimpun, mencatat, mengolah bahan-bahan keterangan dalam pekerjaan kantor yang bekerja secara mekanik, elektrik, dan magnetik.

3. Perabot kantor

Perabot kantor adalah benda-benda kantor yang terbuat dari kayu atau besi untuk membantu pelaksanaan tugas pekerjaan kantor.

2.4.5 Konsep Evaluasi Program

Evaluasi merupakan alat manajemen yang berorientasi pada tindakan dan proses informasi yang dikumpulkan kemudian di analisis sehingga relevansi dan efek serta konsekuensinya ditentukan sistematis dan seobjektif mungkin. Data ini digunakan untuk memperbaiki kegiatan sekarang dan yang akan datang seperti dalam perencanaan program, pengambilan keputusan dan pelaksanaan program untuk mencapai kebijaksanaan yang lebih efektif (Hawkins, 1999).

Kegiatan evaluasi dalam pengembangan program PUAP merupakan proses untuk menyempurnakan kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan, membantu dalam sistem perencanaan, penyusunan program dan sistem

pengambilan keputusan yang bersifat antisipatif, sehingga di masa depan dapat dikembangkan program PUAP yang progresif dan dinamis. Evaluasi menurut Suryahadi (2007) meliputi:

1. Evaluasi proses yaitu evaluasi yang digunakan untuk mengkaji bagaimana program berjalan dengan focus pada masalah penyampaian pelayanan (*service delivery*).
2. Evaluasi biaya-manfaat yaitu evaluasi yang digunakan untuk mengkaji biaya program relative terhadap alternative penggunaan sumberdaya dan manfaat dari program.
3. Evaluasi dampak yaitu evaluasi yang digunakan untuk mengkaji apakah program memberikan pengaruh yang diinginkan terhadap individu, rumahtangga, masyarakat dan kelembagaan.

Menurut Dunn (2000) terdapat beberapa pendekatan dalam evaluasi program, meliputi: evaluasi semu, evaluasi formal dan evaluasi teoritis keputusan.

1. Evaluasi semu

Evaluasi semu (*pseudo evaluation*) adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil program, tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap individu, kelompok atau masyarakat secara keseluruhan.

2. Evaluasi formal

Evaluasi formal (*formal evaluation*) merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil-hasil program atas dasar tujuan program yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat dan administrator program. Evaluasi formal menggunakan undang-undang, dokumen-dokumen program dan wawancara.

3. Evaluasi keputusan teoritis (*decision-theoretic evaluation*) adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid mengenai hasil-hasil program yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku program.

Terdapat beberapa tahap pekerjaan yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan evaluasi untuk memperoleh hasil evaluasi yang efektif. Penting untuk memastikan bahwa setiap tahap pekerjaan ini dilaksanakan dengan benar (Suryahadi, 2007). Tahapan proses evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Menentukan tujuan evaluasi.

Sebuah evaluasi perlu memiliki tujuan yang jelas. Tujuan evaluasi yang jelas akan membantu dalam penyusunan desain evaluasi yang sesuai. Dalam menentukan tujuan evaluasi, perlu mempertimbangkan berbagai konteks yang relevan, baik berkaitan dengan tujuan program itu sendiri maupun tujuan kebijakan yang lebih luas.

2. Menyusun desain evaluasi yang kredibel.

Tahap ini terdiri dari beberapa langkah: (a) menentukan indikator dan tolak ukur yang akan digunakan dalam evaluasi untuk mengukur keberhasilan program; (b) menentukan metode analisis yang akan digunakan dalam evaluasi dan kebutuhan data, termasuk cara pengumpulannya; (c) menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan evaluasi; dan (d) menghitung perkiraan biaya yang diperlukan untuk melaksanakan seluruh kegiatan evaluasi.

3. Mendiskusikan rencana evaluasi.

Pihak-pihak yang pertama kali perlu diajak berdiskusi mengenai rencana evaluasi adalah penyandang dana program dan pelaksana program. Mereka perlu dilibatkan sejak awal agar dapat membantu pelaksanaan evaluasi dan tidak justru sebaliknya menghambat kegiatan ini. Di samping itu perlu juga mendiskusikan rencana evaluasi, terutama rencana desain evaluasi, dengan ahli evaluasi yang berkompeten untuk memperoleh masukan mengenai hal-hal yang perlu diperbaiki dari rencana desain evaluasi yang telah disusun.

4. Menentukan pelaku evaluasi.

Memilih orang atau lembaga yang akan ditugaskan untuk melakukan evaluasi. Pelaku evaluasi dari bersifat internal, yaitu berasal dari pelaksana program sendiri, ataupun eksternal, yaitu pihak luar atau independen.

5. Melaksanakan evaluasi.

Kegiatan inti dalam evaluasi adalah pengumpulan dan analisis data serta penulisan laporan evaluasi. Oleh karena itu, pengawasan kualitas data dan analisis sangat krusial untuk memperoleh kualitas evaluasi yang baik. Dalam penulisan laporan, penting untuk memperhatikan kaidah-kaidah penulisan ilmiah agar dihasilkan suatu laporan evaluasi yang baik, baik dilihat dari segi substansi maupun tata bahasa.

6. Mendiseminasikan hasil evaluasi.

Laporan evaluasi umumnya bersifat teknis, sehingga mungkin sulit dimengerti oleh orang awam. Agar hasil evaluasi dapat digunakan seoptimal mungkin, perlu dibuat versi ringkas dari laporan yang berfokus pada temuan utama dan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh umum.

7. Menggunakan hasil evaluasi.

Hasil evaluasi dapat memberikan rekomendasi berupa tuntutan perubahan, baik dalam pelaksanaan atau bahkan dalam desain program. Perubahan yang disarankan adalah untuk membuat program menjadi lebih efektif dalam upaya mencapai tujuan-tujuannya. Lebih dari itu, hasil evaluasi juga memberikan pembelajaran bagi organisasi pelaksana program secara keseluruhan agar pelaksanaan program-program di masa depan dapat menjadi lebih baik. Pembelajaran dari hasil evaluasi juga akan sangat berguna bagi penyusunan program atau kebijakan baru.

2.4.6 Evaluasi Program PUAP

Evaluasi PUAP yang akan dilakukan adalah untuk mengetahui sejauh mana tujuan PUAP tercapai berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam Pedoman Umum PUAP. Indikator adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa indikator, akan sulit untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan program (Nawawi, 2013). Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan dinilai berdasarkan indikator keberhasilan *outcome*. Indikator keberhasilan *outcome* yaitu segala sesuatu yang mencerminkan

berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator tingkat keberhasilan *outcome* meliputi:

1. Peningkatan kemampuan Gapoktan dalam mengelola bantuan modal usaha untuk petani anggota

Peningkatan kemampuan gapoktan dalam mengelola modal usaha PUAP dilihat berdasarkan kemampuan gapoktan dalam menghimpun modal keswadayaan dan asset gapoktan. Modal keswadayaan dari anggota yang berhasil diorganisir dan dikumpulkan oleh gapoktan dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan Gapoktan dalam mengelola dan melaksanakan PUAP sebagai program pemberdayaan. Penggalangan dana keswadayaan oleh gapoktan PUAP dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela merupakan alat ukur utama dalam menentukan kemandirian gapoktan untuk dapat dijadikan Lembaga Keuangan Mikro. Simpanan pokok yaitu simpanan yang wajib diserahkan ketika bergabung menjadi anggota gapoktan dan simpanan ini tidak dapat di ambil kembali selama yang bersangkutan menjadi anggota. Besarnya simpanan pokok adalah sama untuk setiap orang yang akan bergabung menjadi anggota Gapoktan Karang Makmur. Simpanan wajib yaitu sejumlah uang tertentu yang harus dibayar oleh anggota dalam waktu tertentu dan simpanan ini tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan menjadi anggota. Simpanan sukarela yaitu simpanan yang diberikan oleh anggota secara sukarela dan dapat diambil kembali dan jumlahnya tergantung pada individu yang bersangkutan (Baswir, 2000). Dana keswadayaan yang dapat dikumpulkan oleh gapoktan harus dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota.

Aset gapoktan merupakan kekayaan gabungan kelompok tani (Gapoktan) yang berasal dari dana keswadayaan (simpanan), dana cadangan dan dana penyertaan pemerintah yang dikelola untuk kepentingan anggota dan kelompok. Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian gapoktan jika diperlukan (Handhikusuma, 2002). Pertumbuhan aset yang dikelola oleh LKMA dapat menjadi ukuran keberhasilan pengurus dan pengelola dalam meyakinkan masyarakat serta anggota untuk menitipkan dana keswadayaan

kepada LKMA, menghasilkan laba dari pengelolaan tersebut, serta dapat meyakinkan pihak lain untuk menitipkan bantuan penguatan modal pemerintah (dana stimulan) maupun program yang ditujukan untuk pemberdayaan gapoktan.

2. Peningkatan jumlah petani dan rumah tangga tani yang mendapatkan bantuan modal usaha

Menurut Pedoman PUAP petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengelola usaha di bidang pertanian yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang. Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dilaksanakan sebagai bentuk penyediaan dana penguatan modal usaha petani sebagai stimulasi melalui koordinasi Gapoktan. Setiap Gapoktan mendapatkan bantuan modal usaha sebesar Rp100.000.000. Dana BLM PUAP yang disalurkan dari Kementerian Pertanian kepada Gapoktan dimanfaatkan sebagai modal usaha produktif di sektor pertanian. Bantuan modal usaha tersebut dilaksanakan dalam bentuk kegiatan simpan pinjam Pinjaman modal usaha bertujuan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis serta memudahkan petani dalam hal permodalan. Peningkatan jumlah petani yang mendapatkan bantuan dana PUAP mencerminkan bahwa gapoktan telah berhasil mengelola dana PUAP sehingga terus dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh petani anggota gapoktan.

3. Peningkatan kegiatan usaha agribisnis (hulu, budidaya dan hilir) di perdesaan

Peningkatan kegiatan agribisnis di desa PUAP menjadi salah satu indikator bahwa program PUAP telah berhasil dilaksanakan dan dikelola oleh gapoktan PUAP. Keberhasilan ini menggambarkan berfungsinya gapoktan sebagaimana yang telah dijelaskan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang Pedoman pembinaan kelembagaan petani. Berdasarkan konsep agribisnis pada program PUAP, agribisnis adalah rangkaian kegiatan usaha pertanian yang terdiri atas 4 (empat) subsistem meliputi subsistem hulu, subsistem pertanian primer, subsistem agribisnis hilir, dan subsistem penunjang. Subsistem hulu adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan sarana produksi (*input*) pertanian. Subsistem pertanian primer adalah kegiatan ekonomi yang menggunakan sarana produksi yang dihasilkan subsistem hulu. Subsistem

agribisnis hilir adalah yang mengolah dan memasarkan komoditas pertanian dan subsistem penunjang adalah kegiatan yang menyediakan jasa penunjang meliputi permodalan dan teknologi. Menurut Suhardi (2012), keuntungan dari sisi budidaya hanya berkisar 21% sementara 79% keuntungan diperoleh dari sisi hilir (perdagangan) dan salah satu persoalan mendasar untuk mengembangkan sisi hilir adalah kualitas SDM, baik SDM petani maupun SDM petugas (PPL).

2.5 Kerangka Pemikiran

Program pembangunan pertanian di Kabupaten Lumajang diorientasikan dalam rangka peningkatan kegiatan agribisnis perdesaan, keberadaan lembaga pertanian serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama petani dan pelaku usaha pertanian. Dalam pencapaian tersebut, kegiatan pembangunan pertanian menuntut termanfaatkannya seluruh potensi yang dimiliki masyarakat, baik sumber daya alam, manusia, teknologi maupun kelembagaan secara optimal dengan tetap memegang prinsip pertanian yang berkelanjutan.

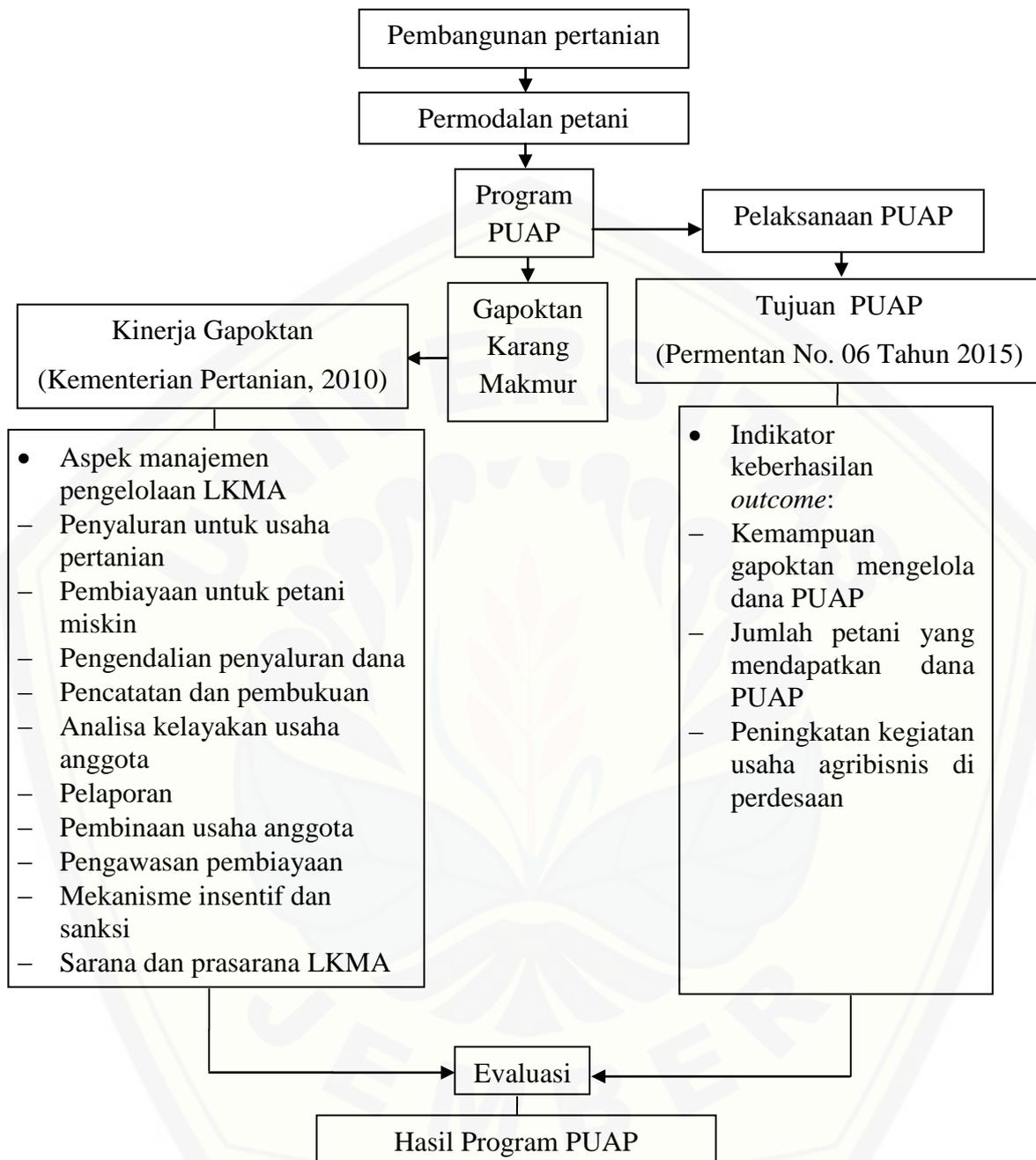
Kenyataannya, sektor pertanian di Kabupaten Lumajang sebagian besar dibangun oleh petani dengan skala usaha yang relatif kecil. Keadaan pelaku usaha pertanian tersebut setiap tahun semakin bertambah jumlahnya dengan tingkat kesejahteraan yang masih rendah. Skala usaha pertanian yang kecil menghambat petani meningkatkan pendapatannya sehingga sulit keluar dari lingkaran kemiskinan.

Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) merupakan program terobosan Departemen Pertanian untuk penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah pusat dan daerah serta antara subsektor. Desa PUAP ditetapkan oleh Menteri Pertanian dengan memperhatikan dan mempertimbangkan usulan Bupati/Walikota, aspirasi masyarakat dan usulan unit kerja lingkup Departemen Pertanian. Pada setiap desa calon lokasi PUAP, akan ditetapkan satu gapoktan penerima dana PUAP.

Desa Karangbendo merupakan salah satu desa yang menerima bantuan program PUAP. Bantuan program PUAP ini dikelola oleh Gapoktan Karang Makmur sebagai satu-satunya Gapoktan yang berada di Desa Karangbendo. Program PUAP ini baru diterima oleh Gapoktan dan dana PUAP baru masuk ke rekening Gapoktan Karang Makmur pada Desember tahun 2012, yang kemudian dicairkan dan disalurkan kepada petani anggota Gapoktan pada Januari tahun 2013. Dana BLM-PUAP disalurkan kepada masing-masing anggota Gapoktan yang terdaftar menjadi anggota penerima PUAP. Besarnya modal yang diterima oleh masing-masing anggota adalah sebesar Rp500.000 sampai Rp3.000.000 dengan waktu pengembalian ditentukan berdasarkan kesepakatan petani yaitu setiap bulan atau pada setiap panen (musiman). Pada bulan Januari tahun 2013, dana BLM-PUAP hanya dapat disalurkan ke 77 anggota. Hal ini dikarenakan dana masih baru diterima dan belum mengalami perkembangan (terbatas). Dana BLM-PUAP disalurkan kepada anggota Gapoktan yang memiliki usaha produktif, yakni tanaman pangan, hortikultura, peternakan, industri rumah tangga pertanian, pemasaran skala mikro/bakulan, dan usaha lain berbasis pertanian.

Keberlanjutan program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) sangat ditentukan pada keberhasilan pengelolaan dana tersebut oleh kinerja Gapoktan sebagai lembaga pelaksana yang dipercaya untuk mengelola dana tersebut. Gapoktan didampingi oleh tenaga Penyuluh Pendamping. Gapoktan PUAP diharapkan dapat menjadi kelembagaan ekonomi yang dimiliki dan dikelola petani. Keberhasilan kinerja Gapoktan diukur dari aspek manajemen pengelolaan LKMA. Adanya bantuan modal PUAP ini diharapkan dapat meringankan beban petani terutama dalam hal pemenuhan modal kerja bagi usahataniya sehingga dapat memajukan perekonomian petani, memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi pedesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis. Penilaian manfaat dana PUAP dilakukan dengan melihat indikator keberhasilan PUAP yaitu indikator keberhasilan *outcome* sebagaimana yang tercantum pada pedoman umum PUAP.

Penilaian terhadap indikator-indikator tersebut nantinya akan digunakan untuk proses pemetaan tingkat kemampuan Gapoktan sebagai lembaga pelaksana dan pengelola program PUAP serta pengevaluasian pelaksanaan program PUAP di Desa Karangbendo. Penilaian akan memberikan informasi mengenai capaian atau hasil dari program PUAP bagi Gapoktan Karang Makmur dan Desa Karangbendo, sehingga dapat diketahui pemeringkatan atau pengklasifikasian kelas Gapoktan serta dampak pelaksanaan dari adanya program PUAP bagi kegiatan agribisnis di Desa Karangbendo. Pemeringkatan Gapoktan diklasifikasikan dalam 3 strata, yaitu: Gapoktan pemula, Gapoktan madya dan Gapoktan utama. Pengklasifikasian ini dijadikan dasar dalam pembinaan organisasi gapoktan lebih lanjut. Hasil evaluasi juga menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan program PUAP di Desa Karangbendo sehingga dapat ditentukan pola dan sistem pemberdayaan program PUAP secara berkelanjutan untuk kedepannya. Gagasan pemikiran di atas secara terstruktur dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Penentuan Daerah Penelitian

Penentuan objek penelitian dilakukan secara sengaja (*purposive*), yaitu pada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Karang Makmur Desa Karangbendo Kabupaten Lumajang. Penentuan tersebut dilakukan atas dasar pertimbangan bahwa Gapoktan Karang Makmur merupakan salah satu Gapoktan penerima bantuan dana PUAP dan telah dipercaya oleh Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Tekung untuk mewakili lomba LKMA di tingkat Kabupaten Lumajang. Gapoktan Karang Makmur mampu mengelola dana PUAP dengan perkembangan dana mencapai 22,3% selama kurang lebih 3 tahun berjalannya program, terhitung mulai Januari 2013 hingga September 2015. Gapoktan Karang Makmur juga merupakan gapoktan yang aktif dalam kegiatan-kegiatan pertaniannya seperti mengikuti rapat, baik rapat yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian maupun rapat kepengurusan, mengikuti pelatihan-pelatihan dari Dinas Pertanian seperti bimbingan teknis Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) dan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA).

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki (Nazir, 2014). Penggunaan metode deskriptif kuantitatif ini diselaraskan dengan variabel penelitian yang memusatkan pada masalah-masalah aktual dan fenomena yang sedang terjadi pada masa sekarang dengan bentuk hasil penelitian berupa angka-angka memiliki makna.

3.3 Metode Pengambilan Sampel

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 2 metode, yaitu *proportionate random sampling* dan *purposive sampling* yang digunakan untuk mengambil sampel yaitu responden permasalahan pertama yang terdiri dari pengelola LKMA berjumlah 2 orang yaitu manajer dan pengelola LKMA serta anggota Gapoktan Karang Makmur, sedangkan metode *purposive sampling* digunakan untuk mengambil sampel yaitu informan kunci permasalahan kedua.

Penggunaan dua metode pengambilan sampel yang berbeda pada permasalahan pertama dimaksudkan agar penilaian yang diperoleh lebih objektif. Kinerja gapoktan sebagai lembaga pengelola program PUAP dinilai dari dua pihak yaitu pengelola LKMA serta anggota gapoktan. Jumlah (populasi) dari anggota Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Karang Makmur sebagai penerima bantuan dana PUAP adalah sebanyak 173 anggota. Langkah awal dalam pengambilan sampel adalah menentukan jumlah sampel dengan menggunakan rumus Slovin, yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

keterangan:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = *error tolerance* (13,5%)

Pengambilan sampel dengan tingkat eror sebesar 13,5% diperoleh sampel sebanyak 41,66 yang kemudian dibulatkan menjadi 43 anggota. Langkah selanjutnya adalah dengan menentukan jumlah sampel pada masing-masing kelompok tani dengan menggunakan rumus:

$$n_i = \frac{N_i}{N} \times n$$

keterangan:

n_i = jumlah sampel pada kelompok tani ke-i

N_i = jumlah populasi pada kelompok tani ke-i

n = total sampel

N = total populasi

Pengambilan sampel dilakukan dengan cara undian, yaitu dengan memberikan nomor-nomor pada anggota populasi masing-masing kelompok tani kemudian secara acak diambil beberapa nomor tersebut sesuai dengan banyaknya jumlah sampel yang dibutuhkan. Nomor yang telah terambil perlu dikembalikan lagi agar peluangnya tetap sama. Jika nomor yang telah terambil keluar lagi, maka dianggap tidak sah dan dikembalikan lagi.

Tabel 3.1 Penentuan Sampel pada Masing-Masing Kelompok Tani

No	Kelompok Tani	Populasi (N_i)	Sampel (n_i)
1	Pasinan Muda I	32	8
2	Pasinan Muda II	41	10
3	Klapan Jati	16	4
4	Sekardangan	16	4
5	Karya Harapan I	32	8
6	Karya Harapan II	36	9
Total		173	43

Sumber: Data Primer diolah (2015)

Selanjutnya untuk permasalahan kedua, metode pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* digunakan untuk menentukan sampel penelitian dari unit-unit populasi yang dianggap “kunci” (Bungin, 2013). Sampel kunci terdiri dari pelaksana PUAP di tingkat desa yaitu ketua gapoktan, pengelola LKMA meliputi manajer LKMA dan kasir LKMA serta penyuluh pertanian (PPL) dengan pertimbangan bahwa sampel kunci tersebut memiliki informasi yang lebih banyak seputar implementasi dan alokasi pemanfaatan bantuan dana PUAP dan lebih paham mengenai permasalahan dan kendala yang dihadapi petani anggota.

3.4 Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara (*interview*), digunakan apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam berdasarkan pengetahuan dan keyakinan pribadi. Metode wawancara yang digunakan

dalam penelitian ini yaitu *structured interview* (Sugiyono, 2014). *Structured interview* adalah bentuk wawancara dimana peneliti telah menyiapkan instrument penelitian berupa serangkaian daftar pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan.

2. Dokumentasi merupakan kumpulan data baku yang diperoleh dari instansi atau organisasi yang ada, baik pemerintah maupun swasta (Muslimin, 2002). Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian ini. Metode ini digunakan untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder yang diperoleh berupa dokumen pedoman umum/ petunjuk teknis program PUAP, petunjuk teknis pemingkatan Gapoktan menuju LKM-A, data monografi desa, data pembentukan Gapoktan Karang Makmur dan data pembukuan bantuan PUAP.

3.5 Metode Analisis Data

Analisa data untuk menjawab permasalahan pertama yaitu mengenai kinerja Gapoktan Karang Makmur sebagai lembaga pengelola program PUAP di Desa Karangbendo dianalisis dengan menggunakan metode *scoring* melalui skala rating (*rating scale*) sebagai kriteria pengambilan keputusan kinerja/prestasi berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Indikator-indikator kinerja Gapoktan diukur dari aspek manajemen pengelolaan LKMA, yaitu:

1. Penyaluran untuk usaha pertanian (skor 1-3)
2. Pembiayaan untuk petani miskin (skor 1-3)
3. Pengendalian penyaluran dana (skor 1-3)
4. Pencatatan dan pembukuan (skor 1-3)
5. Analisa kelayakan usaha anggota (skor 1-3)
6. Pelaporan (skor 1-3)
7. Pembinaan usaha anggota (skor 1-3)
8. Pengawasan pembiayaan (skor 1-3)
9. Mekanisme insentif dan sanksi (skor 1-3)
10. Sarana dan prasarana LKMA (skor 1-3)

Pengukuran kinerja Gapoktan Karang Makmur sebagai lembaga pengelola bantuan dana PUAP dalam penelitian ini akan dibagi menjadi 3 kategori yaitu baik, cukup dan kurang dengan ketentuan nilai skor sebagai berikut:

Skor 1= kurang

Skor 2= cukup

Skor 3= baik

Perhitungan kinerja Gapoktan dilakukan melalui tabulasi skor. Selanjutnya hasil tabulasi yang diperoleh akan digunakan untuk menentukan kriteria pengambilan keputusan dengan menentukan batasan skor pada masing-masing kriteria. Penentuan rentang skor pada masing-masing kriteria digunakan rumus sebagai berikut (Riduwan, 2005).

$$\text{Range} = \frac{[(S_i \times I) - (S_r \times I)]}{\text{jumlah kriteria}}$$

Keterangan :

S_i = skor ideal atau tertinggi pada setiap item

S_r = skor terendah pada setiap item

I = jumlah item

Maka besarnya range yang diperoleh:

$$\begin{aligned} \text{Range} &= [(3 \times 10) - (1 \times 10)] / 3 \\ &= 6,6 \end{aligned}$$

Kategori kinerja gapoktan berdasarkan rentang skala adalah sebagai berikut:

1. 10 – 16,6 : kinerja gapoktan kurang
2. 16,7 – 23,3 : kinerja gapoktan cukup
3. 23,4 – 30 : kinerja gapoktan baik

Untuk menjawab permasalahan kedua yaitu mengenai pengelolaan program PUAP di Desa Karangbendo Kabupaten Lumajang digunakan metode deskriptif berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan untuk mengetahui keberhasilan *outcome* program PUAP. Indikator keberhasilan *outcome* meliputi:

1. Peningkatan kemampuan Gapoktan dalam mengelola bantuan modal usaha untuk petani anggota

2. Peningkatan jumlah petani dan rumah tangga tani yang mendapatkan bantuan modal usaha
3. Peningkatan kegiatan usaha agribisnis (hulu, budidaya dan hilir) di perdesaan

3.6 Definisi Operasional

1. Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) merupakan bagian dari pelaksanaan program PNPM-Mandiri melalui bantuan modal usaha dalam menumbuhkembangkan usaha agribisnis sesuai dengan potensi pertanian desa sasaran.
2. Responden adalah petani anggota Gabungan Kelompok Tani Karang Makmur dan telah terdaftar sebagai anggota penerima bantuan dana PUAP.
3. Gapoktan Karang Makmur adalah gabungan dari 6 kelompok tani yaitu kelompok tani Pasinan Muda I, Pasinan Muda II, Klapan Jati, Sekardangan, Karya Harapan I dan Karya Harapan II yang berada di Desa Karangbendo Kabupaten Lumajang.
4. Kinerja Gapoktan merupakan hasil kerja Gapoktan Karang Makmur sebagai lembaga pengelola program PUAP yang diukur berdasarkan aspek manajemen pengelolaan LKMA dan dikriteriakan ke dalam 3 kategori yaitu kinerja gapoktan baik, kinerja gapoktan cukup serta kinerja gapoktan kurang.
5. Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) adalah lembaga keuangan mikro yang didirikan, dimiliki dan dikelola oleh petani/masyarakat tani di Desa Karangbendo guna memecahkan masalah/kendala akses untuk mendapatkan pelayanan keuangan untuk membiayai usaha agribisnis.
6. Usaha Produktif adalah segala jenis usaha ekonomi yang dilakukan oleh petani/kelompok tani di Desa Karangbendo dalam bidang agribisnis yang mempunyai transaksi hasil usaha harian, mingguan, bulanan, musiman maupun tahunan.
7. Penyuluh adalah penyuluh pertanian yang ditugaskan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mendampingi petani, poktan dan gapoktan dalam pelaksanaan PUAP di Desa Karangbendo.

8. Pemberdayaan masyarakat pertanian adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat agribisnis di Desa Karangbendo sehingga secara mandiri mampu mengembangkan diri dan melakukan usaha secara berkelanjutan.
9. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah bantuan dana kepada petani/keompok tani untuk pengembangan usaha agribisnis di Desa Karangbendo yang disalurkan melalui Gapoktan Karang Makmur dalam bentuk modal usaha.
10. Indikator *Outcome* yaitu segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran program PUAP pada jangka menengah (efek langsung) bagi petani anggota Gapoktan Karang Makmur di Desa Karangbendo.
11. Agribisnis adalah rangkaian kegiatan usaha pertanian yang terdiri atas 4 sub-sistem, yaitu (a) subsistem hulu yaitu kegiatan ekonomi yang menghasilkan sarana produksi (*input*) pertanian; (b) subsistem pertanian primer yaitu kegiatan ekonomi yang menggunakan sarana produksi yang dihasilkan subsistem hulu; (c) subsistem agribisnis hilir yaitu yang mengolah dan memasarkan komoditas`pertanian; dan (d) subsistem penunjang yaitu kegiatan yang menyediakan jasa penunjang meliputi permodalan dan teknologi.
12. Evaluasi merupakan suatu upaya untuk mengetahui sejauh mana program PUAP telah memberikan manfaat bagi perkembangan usaha agribisnis di Desa Karangbendo Kabupaten Lumajang.

BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Kinerja Gapoktan Karang Makmur sebagai Lembaga Pengelola Program PUAP

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) merupakan organisasi petani di perdesaan yang dibentuk secara musyawarah dan mufakat untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Membangun Gapoktan yang ideal sesuai dengan tuntutan organisasi masa depan diperlukan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pembinaan yang berkelanjutan. Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) merupakan lembaga keuangan mikro yang ditumbuhkan dari gapoktan pelaksana PUAP dengan fungsi utamanya adalah untuk mengelola aset dasar dari dana PUAP dan dana keswadayaan anggota. Dana yang dikelola LKMA dimanfaatkan secara maksimal untuk membiayai usaha produktif anggota.

Pengukuran kinerja gapoktan sebagai lembaga pengelola program PUAP merupakan suatu kegiatan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan program PUAP di tingkat Gapoktan PUAP. Pengelolaan keuangan di tingkat Gapoktan PUAP yang baik adalah berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan kinerja ekonomi masyarakat miskin sehingga dapat keluar dari kemiskinan. Pengelolaan LKMA diukur dari metode pelayanan keuangan yang dapat menjangkau seluruh petani di perdesaan, mengingat selama ini petani mengalami kesulitan untuk mengikuti aturan, regulasi dan persyaratan yang diterapkan perbankan. LKMA dapat menyesuaikan operasional pelayanannya pada azas demokrasi ekonomi dan dapat memberikan kesempatan pada seluruh masyarakat, termasuk masyarakat/petani miskin dan usaha mikro untuk dapat mengembangkan potensi usaha ekonomi produktifnya.

Penumbuhan pelayanan keuangan mikro pada organisasi gapoktan pengelola program PUAP di perdesaan diharapkan dapat menumbuhkan kemandirian ekonomi masyarakat tani dan sekaligus dapat mengatasi persoalan permodalan petani. Program PUAP oleh Kementerian Pertanian telah dilaksanakan dari tahun 2008 melalui pendekatan dan strategi sebagai berikut:

1).Memberikan bantuan stimulus modal usaha kepada petani untuk membiayai usaha ekonomi produktif dengan membuat usulan dalam bentuk RUA, RUK dan RUB serta menggunakan dana PUAP sesuai dengan usulan (tahun ke-I); 2).Petani penerima manfaat program PUAP tersebut harus mengembalikan dana stimulasi modal usaha kepada Gapoktan sehingga dapat digulirkan lebih lanjut oleh Gapoktan melalui kaedah-kaedah usaha simpan-pinjam (tahun ke-II); 3).Dana stimulasi modal usaha yang sudah digulirkan melalui pola simpan-pinjam selanjutnya melalui keputusan seluruh anggota gapoktan diharapkan dapat ditumbuhkan menjadi LKMA dan pada akhirnya difasilitasi menjadi jejaring pembiayaan (*Linkages*) dari perbankan/lembaga keuangan.

Kinerja Gapoktan Karang Makmur sebagai lembaga pengelola program PUAP dinilai berdasarkan aspek manajemen pengelolaan LKMA yang meliputi penyaluran untuk usaha pertanian, pembiayaan kepada petani miskin, pengendalian penyaluran dana, pencatatan dan pembukuan, analisa kelayakan usaha anggota, pelaporan, pembinaan usaha anggota, pengawasan pembiayaan, mekanisme insentif dan sanksi serta sarana dan prasarana LKMA. Penilaian kinerja tersebut dihitung menggunakan metode scoring yang dibagi menjadi 3 kategori yaitu kurang, cukup dan baik. Kategori kurang berada pada rentang skor 10-16,6; kategori cukup berada pada rentang skor 16,7-23,3 dan kategori baik berada pada rentang skor 23,4-30. Penilaian kinerja gapoktan berdasarkan aspek manajemen pengelolaan LKMA akan ditunjukkan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Penilaian Kinerja Gapoktan Karang Makmur Desa Karangbendo Kabupaten Lumajang Tahun 2015

No	Skor	Kinerja	Persentase Penilai (%)	
			Anggota	Pengelola LKMA
1	10-16,6	Kurang	0	0
2	16,7-23,3	Cukup	41,9	0
3	23,4-30	Baik	58,1	100
Jumlah			100,0	100

Sumber: Data Primer diolah Tahun 2015 (Lampiran C, 89)

Berdasarkan Tabel 5.1 dapat diketahui bahwa penilaian antara anggota dan pengelola LKMA terhadap kinerja gapoktan adalah baik. Sebanyak 25 orang (58,1%) anggota dan 2 orang (100%) pengelola LKMA menilai bahwa kinerja

gapoktan dalam mengelola program PUAP adalah baik. Penilaian kinerja gapoktan cukup adalah sebanyak 18 orang (41,9%) dan tidak terdapat anggota gapoktan yang memberikan penilaian kurang terhadap kinerja Gapoktan Karang Makmur, sehingga dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja Gapoktan Karang Makmur sebagai lembaga pengelola program PUAP adalah baik. Gapoktan Karang Makmur telah mengelola program PUAP sesuai dengan aspek manajemen pengelolaan LKMA berdasarkan pada juknis Deptan mengenai pemeringkatan (*rating*) gapoktan PUAP menuju LKMA.

Penilaian kinerja Gapoktan Karang Makmur baik disebabkan karena terdapat beberapa indikator pada aspek manajemen pengelolaan LKMA yang memperoleh nilai baik meliputi pencatatan dan pembukuan, penyaluran untuk usaha pertanian, pembiayaan kepada petani miskin, pengendalian penyaluran dana serta pembinaan usaha anggota.

5.1.1 Pencatatan dan Pembukuan

Pencatatan dan pembukuan merupakan salah satu bentuk pengendalian penyaluran dana PUAP yang dilakukan oleh Gapoktan Karang Makmur dalam mengelola dan melaksanakan program PUAP. Pencatatan yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara sederhana mengenai jumlah peredaran atau penerimaan keuangan. Pencatatan dilakukan dalam bentuk/format yang mudah dibaca dengan mencantumkan periode pencatatan, sedangkan pembukuan didefinisikan sebagai suatu proses pencatatan namun dilakukan secara rapi dan teratur atas data-data transaksi dan informasi keuangan yang meliputi modal, penghasilan dan biaya. *Output* dari pembukuan yaitu laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi. Berikut merupakan grafik hasil analisis penilaian kinerja gapoktan pada indikator pencatatan dan pembukuan.



Gambar 5.1 Grafik Penilaian Pencatatan dan Pembukuan (Sumber: Lampiran D, 90)

Berdasarkan Gambar 5.1 dapat diketahui bahwa semua responden pengelola LKMA dan anggota memberikan penilaian baik terhadap kinerja Gapoktan Karang Makmur dalam melakukan pencatatan dan pembukuan. Pencatatan dan pembukuan dinilai baik disebabkan karena gapoktan dalam mengelola dana PUAP telah melakukan aktivitas pencatatan dan pembukuan dalam kegiatan usaha LKMANYa. Seluruh transaksi keuangan telah dicatat dan dilakukan sesuai dengan prinsip dasar manajemen keuangan serta pencatatan dan pembukuan Gapoktan Karang Makmur telah diwujudkan dalam bentuk neraca dan laporan laba /rugi.

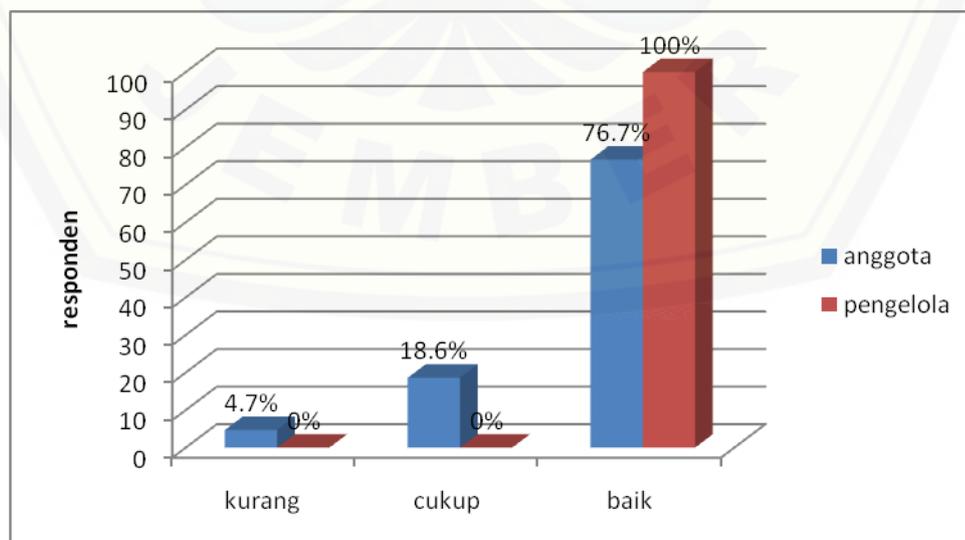
Pengelola LKMA menyatakan bahwa Gapoktan Karang Makmur sebagai organisasi yang mengelola dana PUAP telah melakukan pencatatan dan pembukuan dalam aktivitas gapoktan PUAP. Pembukuan Keuangan di Gapoktan Karang Makmur menggunakan buku-buku sebagai berikut: Buku Kas Masuk, Buku Kas Keluar, Kartu Simpanan Anggota dan Kartu Pinjaman Anggota, kemudian untuk menganalisis keuangan dan mengetahui Laba atau Rugi digunakan Neraca dan Laporan Laba rugi. Gapoktan Karang Makmur telah membentuk pengelola LKMA dalam melakukan pengelolaan dana PUAP. Pengelola LKMA terdiri dari kasir dan manajer. Kasir LKMA bertugas memberikan pinjaman, melakukan pencatatan kartu pembayaran anggota, pencatatan kas masuk dan kas keluar serta menerima uang pembayaran pinjaman

dari anggota yang selanjutnya akan disetorkan kepada manajer LKMA untuk dibukukan sehingga dihasilkan laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi. Anggota menyatakan bahwa dengan adanya pencatatan maka dapat diketahui jika telah melakukan pembayaran dan pencatatan tersebut juga dapat digunakan sebagai alat bukti pembayaran serta transparansi ketentuan pembayaran pinjaman dengan nominal jumlah pembayaran pokok serta besarnya bunga pinjaman yang dibebankan.

Berdasarkan penilaian tersebut, dapat diketahui bahwa adanya pencatatan dan pembukuan dalam suatu organisasi yang bergerak pada jasa keuangan merupakan hal yang sangat penting. Pencatatan dan pembukuan dapat digunakan untuk mengetahui kondisi usaha gapoktan dalam mengelola dana BLM PUAP. Adanya pencatatan yang teratur dapat membandingkan kondisi keuangan dari tahun sebelumnya dengan saat ini, sehingga dapat diketahui apakah laba usaha mengalami kenaikan atau sebaliknya. Adanya laporan keuangan juga dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan kelayakan usaha untuk mendapatkan bantuan atau tambahan modal dari pihak lain seperti perbankan.

5.1.2 Penyaluran untuk Usaha Pertanian

Berikut merupakan grafik hasil analisis penilaian kinerja gapoktan pada indikator penyaluran untuk usaha pertanian.



Gambar 5.2 Grafik Penilaian Penyaluran Usaha Pertanian (Sumber: Lampiran E, 90)

Berdasarkan Gambar 5.2 dapat diketahui bahwa sebanyak 2 orang (100%) pengelola LKMA dan 33 orang (76,7%) anggota memberikan penilaian baik terhadap kinerja Gapoktan Karang Makmur dalam menyalurkan dana PUAP untuk usaha pertanian. Penyaluran dana PUAP untuk usaha pertanian dinilai baik disebabkan karena dana PUAP telah dikelola dan terus dikembangkan sesuai dengan prinsip pemberdayaan untuk disalurkan kepada usaha pertanian anggota baik *on farm* maupun *off farm*, sedangkan sebanyak 2 orang (4,7%) anggota memberikan penilaian kurang. Hal ini disebabkan karena adanya penyalahgunaan kredit dana PUAP oleh anggota gapoktan yang digunakan sebagai modal untuk usaha non pertanian seperti usaha konter dan aksesoris.

Penyalahgunaan kredit artinya penggunaan pinjaman kredit yang tidak digunakan sesuai dengan RUA yang telah di ajukan. Sebanyak 2 orang (4,7%) anggota yang melakukan penyalahgunaan kredit. Rencana usaha anggota (RUA) tertulis bahwa pinjaman akan digunakan sebagai modal usaha tani padi dengan lahan seluas 0,2 Ha dan biaya yang diperlukan sebesar Rp2.000.000, namun setelah diberikan pinjaman dana PUAP tersebut justru disalahgunakan untuk membeli laptop dan digunakan sebagai modal untuk usaha non pertanian seperti usaha konter dan aksesoris.

Pengelola LKMA menyatakan bahwa pengelolaan dana PUAP yang dilakukan oleh Gapoktan Karang Makmur telah disalurkan kepada anggota dengan usaha pertanian baik *on farm* maupun *off farm*. Kegiatan *on farm* terdiri dari usaha pertanian dan peternakan, sedangkan kegiatan *off farm* terdiri dari usaha industri rumah tangga dan pemasaran skala mikro. Pengelola LKMA menyatakan bahwa penyaluran dana BLM PUAP yang diberikan oleh pengelola kepada petani lebih mengutamakan penyaluran kepada petani yang bekerja disektor *on farm*. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa sektor *on farm* merupakan sektor yang dijadikan pekerjaan utama petani anggota gapoktan, sedangkan sektor *off farm* lebih mengarah kepada kegiatan ekonomi sampingan yang biasanya dilakukan oleh keluarga petani (ibu-ibu rumah tangga) sebagai usaha membantu suami untuk memperoleh tambahan pendapatan di keluarganya.

Sebanyak 32 orang (74,4%) anggota bekerja disektor *on farm* yaitu sebagai petani dan 2 orang (4,7%) anggota bekerja sebagai peternak, sedangkan sisanya sebanyak 9 orang (20,9%) anggota bekerja disektor *off farm* yaitu sebagai pedagang (Lampiran F, 90). Anggota yang bekerja sebagai petani memiliki luas lahan berkisar antara 0,2-2 Ha. Dana PUAP yang diperoleh petani digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha taninya seperti pembelian saprodi berupa benih, bibit, pupuk dan obat-obatan serta biaya tenaga kerja untuk menggarap sawah. Anggota yang bekerja sebagai peternak mengusahakan peternakan bebek dan ayam petelur dengan jumlah bebek yang dimiliki sebanyak 180 ekor dan ayam 200 ekor. Dana PUAP yang diterima digunakan untuk membeli pakan, membeli ayam atau bebek baru dan memperbaiki kandang yang rusak. Sebanyak 9 orang (20,9%) anggota bekerja pada sektor *off farm*, yaitu industri pembuatan tahu, pedagang susu sapi, warung sembako, warung nasi, dan bakulan (*mlijo*). Dana PUAP yang diterima oleh anggota pada sektor *off farm* digunakan sebagai modal untuk membeli kebutuhan usahanya seperti membeli bahan baku industri, membeli produk untuk dijual kembali di toko (*kulakan*) dan menambah macam/jenis produk baru yang akan dijual.

5.1.3 Pembiayaan kepada Petani Miskin

Petani miskin menurut menurut konsep PUAP dilihat berdasarkan indikator kemiskinan dari data Sensus Pertanian yang menyatakan bahwa petani miskin adalah petani gurem. Petani gurem yaitu rumah tangga pertanian pengguna lahan yang menguasai lahan kurang dari 0,5 Ha. Sempitnya penguasaan lahan pertanian tersebut yang membuat produksi menjadi tidak efisien sehingga pendapatan petani menjadi terbatas. Berikut merupakan grafik hasil analisis penilaian kinerja gapoktan pada indikator pembiayaan kepada petani miskin.



Gambar 5.3 Grafik Penilaian Pembiayaan kepada Petani Miskin
(Sumber: Lampiran G, 90)

Berdasarkan Gambar 5.3 dapat diketahui bahwa sebanyak 2 orang (100%) pengelola LKMA dan 35 orang (81,4%) anggota memberikan penilaian baik terhadap kinerja Gapoktan Karang Makmur dalam melakukan pembiayaan kepada petani miskin. Pembiayaan kepada petani miskin dinilai baik disebabkan karena dana PUAP yang dikelola oleh gapoktan telah disalurkan kepada petani miskin yang selama ini tidak pernah bisa akses kepada sumber pembiayaan perbankan, sedangkan sebanyak 4 orang (9,3%) anggota memberikan penilaian kurang. Hal ini disebabkan karena adanya pembiayaan yang dilakukan oleh gapoktan kepada petani dengan luas lahan lebih dari 1 Ha sehingga pembiayaan dana PUAP dinilai kurang tepat sasaran.

Anggota menyatakan bahwa program PUAP membantu dan bermanfaat sebagai tambahan modal awal untuk berusaha tani. Penyaluran dana PUAP kepada petani dinilai tepat, mengingat selama ini petani masih kesulitan dalam mendapatkan pinjaman, walaupun ada peminjaman dilakukan kepada tengkulak atau pedagang besar dengan bunga lebih tinggi dari pada gapoktan. Penyaluran dana PUAP yang dilakukan oleh gapoktan juga tidak hanya diberikan kepada petani miskin atau petani gurem, petani dengan luas lahan lebih dari 0,5 Ha pun dapat memperoleh pinjaman dari gapoktan. Gapoktan tidak membatasi petani

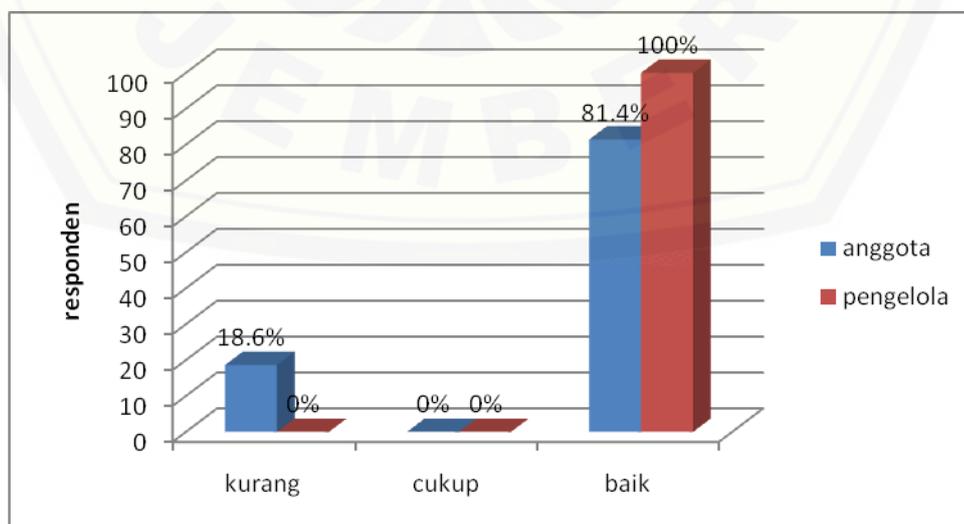
yang akan melakukan peminjaman, yang terpenting adalah petani tersebut sudah terdaftar menjadi anggota Gapoktan Karang Makmur dan memiliki usaha.

Pengelola LKMA memberikan pembiayaan kepada petani anggota yang memang membutuhkan tambahan modal usaha dan bersedia untuk mengembalikannya. Pertimbangan pengelola LKMA dalam memberikan pembiayaan kepada petani adalah adanya usaha yang dimiliki. Hasil analisis menunjukkan bahwa 35 orang (81,4%) petani anggota Gapoktan Karang Makmur memiliki luas lahan <0,5 Ha (petani gurem) dan sisanya sebanyak 8 orang (18,6%) adalah petani dengan luas lahan $\geq 0,5$ Ha (Lampiran H, 91).

5.1.4 Pengendalian Penyaluran Dana

Pengendalian penyaluran dana dilakukan oleh pengurus gapoktan bersama dengan komite pengarah yang bertujuan untuk mengawasi dan mengendalikan total serta kualitas pembiayaan kepada anggota. Komite pengarah terdiri dari Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), tokoh masyarakat dan tokoh tani. Komite pengarah dibentuk oleh kepala desa untuk melakukan fungsi:

1. Fungsi pembinaan, antara lain: saran pertimbangan dalam penetapan rencana usaha bersama (RUB), penambahan dan pengembangan unit usaha otonom gapoktan.
2. Fungsi pengawasan, antara lain: pengawasan mulai tahap pengusulan dokumen penyaluran sampai pemanfaatan dana BLM PUAP.



Gambar 5.4 Grafik Penilaian Pengendalian Penyaluran Dana (Sumber: Lampiran I, 91)

Berdasarkan Gambar 5.4 dapat diketahui bahwa sebanyak sebanyak 2 orang (100%) pengelola LKMA dan 35 orang (81,4%) anggota memberikan penilaian baik terhadap kinerja Gapoktan Karang Makmur dalam melakukan pengendalian penyaluran dana. Pengendalian penyaluran dana dinilai baik disebabkan karena gapoktan sebagai lembaga pengelola program PUAP telah melakukan pemisahan tugas antara pengurus dan pengelola LKMA serta gapoktan telah melakukan aktivitas pencatatan dan pembukuan dalam kegiatan usaha LKMAny, sedangkan sebanyak 8 orang (18,6%) anggota memberikan penilaian kurang. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan petani mengenai pemisahan antara pengurus gapoktan dengan pengelola LKMA. Petani kurang mengetahui posisi pelaksana operasional LKMA sebagai pengelola. Petani hanya mengetahui nama serta subjek yang terkait secara langsung untuk dapat melakukan peminjaman dana PUAP.

Pengelola LKMA menyatakan bahwa mekanisme pengendalian penyaluran dana yang dilakukan oleh pengurus Gapoktan Karang Makmur bersama komite pengarah adalah dengan melakukan pemisahan tugas antara pengurus gapoktan dengan pengelola LKMA serta melakukan pencatatan dan pembukuan transaksi dana PUAP. Pengendalian tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar pelaksanaan program PUAP tidak mengalami hambatan dan juga mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pengelola yang disertai tugas dalam melaksanakan program PUAP.

Pengurus gapoktan dan pengelola LKMA pada Gapoktan Karang Makmur telah dipisahkan. Berdasarkan AD/ART Gapoktan Karang Makmur, untuk mengelola, mengatur dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan kepada anggota maka dibentuk pengurus. Pengurus Gapoktan Karang Makmur dipilih dari dan oleh anggota melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT). Adapun syarat-syarat yang ditentukan adalah: memiliki sifat jujur, mempunyai nama baik di lingkungan masyarakat, mempunyai waktu, kemauan dan kemampuan untuk mengolah Gapoktan Karang Makmur dan minimal sudah tiga tahun menjadi anggota. Pengelola merupakan masyarakat yang diangkat dan diberhentikan oleh pengurus

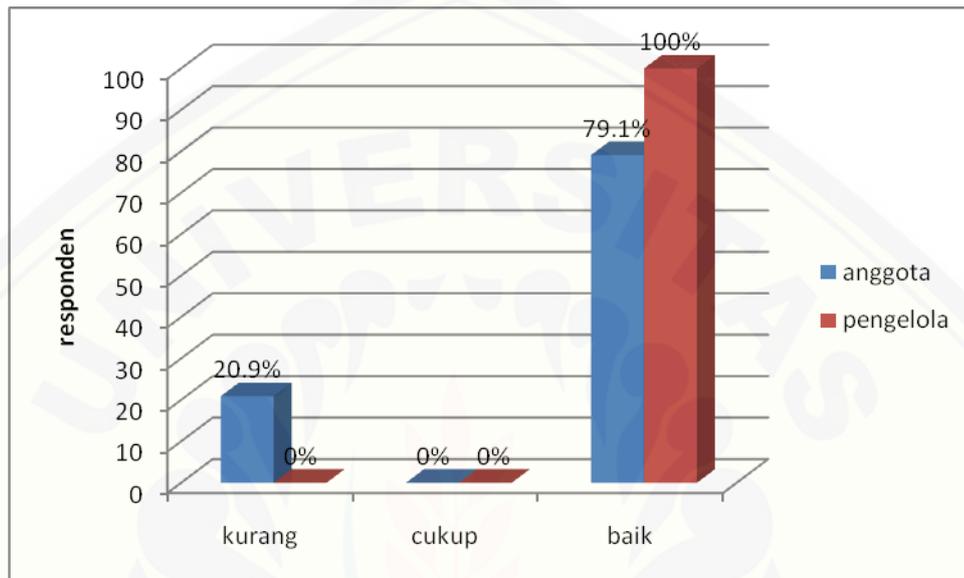
untuk mengelola kegiatan usaha gapoktan secara efisien dan profesional. Kedudukan pengelola LKMA adalah sebagai pegawai yang diberi wewenang oleh pengurus Gapoktan Karang Makmur dalam menjalankan unit usaha LKMA. Pengelola LKMA antara lain terdiri dari manajer dan kasir, dimana masing-masing posisi tersebut diduduki oleh Bapak Arif Harun Al-rosyid S.Pd selaku manajer dan Ibu Illawati selaku kasir.

Sebanyak 35 orang (81,4%) anggota menyatakan bahwa dalam melakukan transaksi peminjaman dana PUAP kepada Gapoktan Karang Makmur dilayani oleh pengelola LKMA yaitu Ibu Illawati selaku kasir LKMA. Mulai dari proses pendaftaran, pencairan hingga pembayaran pinjaman dilakukan pada orang yang sama. Hal tersebut dinilai lebih memudahkan dan meyakinkan anggota dalam melakukan transaksi peminjaman dan pembayaran karena anggota memiliki anggapan bahwa jika peminjaman dilakukan kepada kasir LKMA maka pembayarannya pun juga dilakukan kepada kasir LKMA. Lain halnya jika pembayaran dilakukan secara bersama-sama dengan anggota kelompok tani masing-masing yang dikoordinir oleh ketua kelompok tani, maka transaksi pembayaran akan diberikan kepada kasir LKMA dengan menunggu terkumpulnya pembayaran dari anggota lain terlebih dahulu sehingga menyebabkan anggota yang telah membayar tepat waktu menjadi terkesan ikut terlambat membayar. Hal itulah yang menjadi salah satu alasan mengapa anggota lebih yakin jika melakukan pembayaran secara langsung kepada kasir LKMA, selain itu anggota juga diberikan kelonggaran untuk dapat melakukan pembayaran diluar jam kantor, yaitu di rumah kasir LKMA. Kedisiplinan dalam melakukan pembayaran pinjaman menjadi salah satu prestasi tersendiri bagi anggota maupun pengelola LKMA terhadap anggotanya.

5.1.5 Pembinaan Usaha Anggota

Pembinaan usaha anggota dilakukan pada pertemuan rutin bulanan yang dilaksanakan di sekretariat Gapoktan Karang Makmur. Pertemuan rutin bulanan sebagai wujud pembinaan ditujukan untuk menyatukan persepsi dan menyalurkan aspirasi antar kelompok tani anggota Gapoktan Karang Makmur sehingga dapat

memajukan gapoktan secara bersama-sama disamping sebagai wadah menjalin silaturahmi antar anggota. Pertemuan rutin bulanan tersebut dihadiri oleh PPL, pengurus gapoktan dan pengurus kelompok tani sebagai wakil anggota kelompok tani. Berikut merupakan grafik hasil analisis penilaian kinerja gapoktan pada indikator pembinaan usaha anggota.



Gambar 5.5 Grafik Penilaian Pembinaan Usaha Anggota (Sumber: Lampiran J, 91)

Berdasarkan Gambar 5.5 dapat diketahui bahwa sebanyak sebanyak 2 orang (100%) pengelola LKMA dan 34 orang (79,1%) anggota memberikan penilaian baik terhadap kinerja Gapoktan Karang Makmur dalam melakukan pembinaan usaha anggota. Pembinaan usaha anggota dinilai baik disebabkan karena pembinaan yang diberikan oleh gapoktan mampu menjaga keterjaminan proses pengembalian pembiayaan dari anggota, sedangkan sebanyak 9 orang (20,9%) anggota memberikan penilaian kurang. Hal ini disebabkan karena pembinaan yang diberikan oleh gapoktan kepada anggota masih terbatas kepada usaha anggota pada sektor *on farm* belum mencakup usaha anggota pada sektor *off farm*.

Pembinaan usaha anggota yang dilakukan oleh Gapoktan Karang Makmur ditujukan untuk meningkatkan kemampuan petani anggota gapoktan dalam memanfaatkan lahannya dan sebagai wadah untuk akses petani terhadap berbagai informasi mengenai implementasi kegiatan pemerintah ke desa, dimana pihak

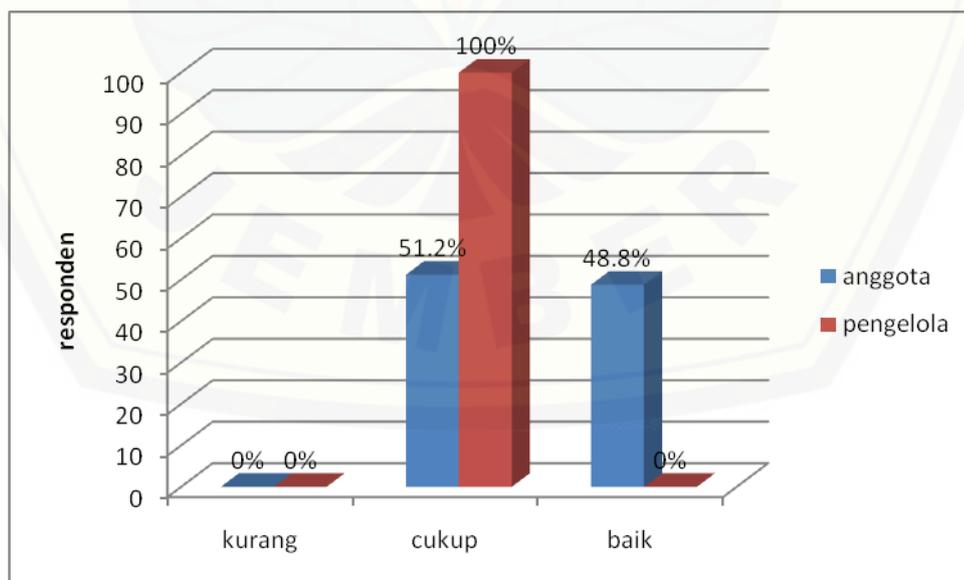
gapoktan selalu dilibatkan dalam kegiatannya. Kegiatan atau program pemerintah termasuk fasilitas permodalan dana PUAP tersebut. Pembinaan biasanya dilakukan oleh PPL maupun ketua Gapoktan Karang Makmur. Adapun bentuk pembinaan yang disampaikan pada saat pertemuan rutin bulanan antara lain, yaitu:

1. Penyampaian informasi mengenai dana PUAP, bahwa dana tersebut merupakan dana yang harus dikelola dengan baik, bukan merupakan dana yang langsung habis pakai. Mengingat bahwa anggota seringkali menganggap dana PUAP sebagai dana hibah yang dibagi-bagikan tanpa ada upaya untuk mengembalikan. Pembinaan tersebut dimaksudkan untuk mengubah persepsi anggota gapoktan sehingga secara bertanggungjawab dapat mengembalikan dana tersebut tepat waktu.
2. Pembinaan mengenai penggunaan dana PUAP oleh anggota Gapoktan Karang Makmur agar penggunaan dana disesuaikan dengan RUA yang telah diajukan, sistem angsuran yang disesuaikan dengan jenis usaha dan batas akhir pinjaman selama satu tahun, adanya sanksi keterlambatan dan jika terdapat pembiayaan bermasalah ketua kelompok tani diharapkan dapat mengingatkan dan membantu untuk melakukan penagihan terhadap anggota kelompok tani masing-masing.
3. Penyampaian informasi mengenai program-program pemerintah lainnya dan bantuan yang diterima oleh gapoktan maupun kelompok tani, seperti program SLPTT, bentuk pembinaan yang diberikan meliputi kelengkapan administrasi SLPTT seperti CPCL (Calon Petani Calon Lahan) untuk segera ditentukan; program BLBU, pemberian informasi mengenai adanya bantuan benih padi hibrida dan benih jagung; program optimalisasi lahan, bantuan *hand traktor* dan mesin *transplanter*.
4. Pembinaan kelompok tani dalam pembuatan proposal pengajuan bantuan kepada pemerintah, himbuan kepada petani untuk menggunakan benih unggul bersertifikat dan pemupukan berimbang sesuai dengan sigarpun bulat (aksi gerakan pemupukan organik dan benih unggul bersertifikat) untuk meningkatkan hasil produksi, serta permasalahan-permasalahan yang mungkin

terjadi pada anggota gapoktan mengenai usaha yang dijalannya seperti pembagian air menjelang musim kemarau agar tidak terjadi kesenjangan antar petani, himbuan pembersihan saluran irigasi menjelang musim penghujan agar tidak terjadi banjir.

5.1.6 Analisa Kelayakan Usaha Anggota

Analisa kelayakan usaha adalah upaya untuk mengetahui tingkat kelayakan untuk dikerjakan dari suatu jenis usaha dengan melihat beberapa parameter atau kriteria kelayakan tertentu. Suatu usaha dikatakan layak jika keuntungan yang diperoleh dapat menutup seluruh biaya yang dikeluarkan, baik biaya langsung maupun biaya tidak langsung. Setiap pembiayaan yang diberikan harus dilakukan analisa kelayakan usaha terlebih dahulu. Hal tersebut digunakan untuk menekan kerugian yang dialami oleh gapoktan jika terjadi kemacetan atau tunggakan pengembalian. Atas dasar itulah, maka kemampuan menilai kelayakan suatu usaha bagi pengelola Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) merupakan kemampuan pokok dan menentukan bagi kelangsungan dan perkembangan usaha LKMA. Berikut merupakan grafik hasil analisis penilaian kinerja gapoktan pada indikator analisa kelayakan usaha anggota.



Gambar 5.6 Grafik Penilaian Analisa Kelayakan Usaha Anggota
(Sumber: Lampiran K, 91)

Berdasarkan Gambar 5.6 dapat diketahui bahwa sebanyak 21 orang (48,8%) anggota memberikan penilaian baik terhadap kinerja Gapoktan Karang Makmur dalam melakukan analisa kelayakan usaha anggota. Analisa kelayakan usaha anggota dinilai baik disebabkan karena prosedur analisa yang dilakukan oleh pengelola LKMA memudahkan petani anggota untuk mendapatkan bantuan dana PUAP dengan persyaratan yang ditetapkan oleh pengelola LKMA sangat mudah dan murah, sedangkan sebanyak 2 orang (100%) pengelola LKMA dan 22 orang (51,2%) anggota memberikan penilaian cukup. Hal ini disebabkan karena analisis kelayakan usaha anggota yang dilakukan oleh pengelola LKMA belum memperhatikan aspek-aspek analisis kelayakan usaha untuk pembiayaan secara lengkap yang meliputi peluang pasar, tingkat keuntungan, kebutuhan modal riil yang perlu dicukupi dari pembiayaan dan kemampuan membayar kembali. Pengelola LKMA dalam melakukan analisa kelayakan usaha anggota masih terbatas pada aspek kebutuhan modal riil yang perlu dicukupi dari pembiayaan, yaitu dengan melihat Rencana Usaha Anggota (RUA) yang diajukan oleh anggota.

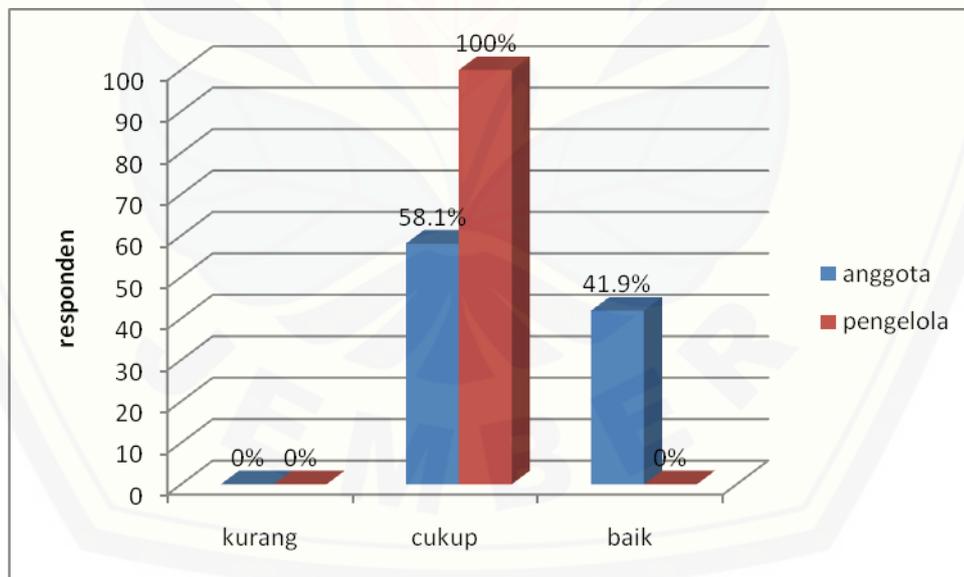
Pengelola LKMA sebelum memberikan pembiayaan kepada petani terlebih dahulu melakukan analisis terhadap usaha yang dimiliki oleh petani. Hal tersebut tertuang pada Rencana Usaha Anggota (RUA) yang diajukan sebagai syarat untuk mendapatkan pinjaman modal PUAP. Rencana usaha anggota (RUA) adalah rencana usaha untuk pengembangan agribisnis yang disusun oleh anggota petani berdasarkan jenis usaha, volume usaha dan kebutuhan biaya. RUA digunakan pengelola LKMA sebagai pertimbangan dalam penyaluran/pembiayaan kepada petani dimana sebelumnya akan dilakukan analisis terhadap usaha petani dengan memperhitungkan jumlah biaya riil yang dibutuhkan.

Sebanyak 22 orang (51,2%) anggota menyatakan bahwa sebelum diberikan pembiayaan, pengelola LKMA biasanya mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan tujuan penggunaan pinjaman dana PUAP sesuai dengan RUA yang telah diajukan. Beberapa pertanyaan yang sering diajukan oleh pengelola LKMA adalah mengenai penggunaan dana pinjaman nantinya untuk usaha apa, dimana letak usahanya, bagaimana keadaan usahanya,

serta sudah berapa lama mengusahakannya, namun ada juga anggota yang menyatakan bahwa sebelum diajukan pertanyaan oleh pihak pengelola LKMA, anggota tersebut telah menjelaskan terlebih dahulu maksud peminjaman dana PUAP yang akan dilakukannya.

5.1.7 Mekanisme Insentif dan Sanksi

Insentif merupakan suatu bentuk kompensasi yang diberikan secara sengaja kepada anggota gapoktan yang memiliki kedisiplinan dalam pengembalian dana pinjaman PUAP sehingga kegiatan Gapoktan Karang Makmur dalam mengelola dana PUAP dapat terus berjalan dan berkembang. Pemberian insentif oleh Gapoktan Karang Makmur digunakan sebagai sarana motivasi anggota untuk mendorong semangat kesadaran diri serta tanggung jawab anggota untuk dapat lebih disiplin dalam pengembalian pinjaman kepada gapoktan. Berikut merupakan grafik hasil analisis penilaian kinerja gapoktan pada indikator mekanisme insentif dan sanksi.



Gambar 5.7 Grafik Penilaian Mekanisme Insentif dan Sanksi (Sumber: Lampiran L, 92)

Berdasarkan Gambar 5.7 dapat diketahui bahwa sebanyak 18 orang (41,9%) anggota memberikan penilaian baik terhadap kinerja Gapoktan Karang Makmur dalam melakukan mekanisme insentif dan sanksi. Mekanisme insentif dan sanksi dinilai baik disebabkan karena pemberian insentif dan sanksi oleh

pengelola LKMA kepada petani anggota dilakukan secara konsisten, sedangkan sebanyak 2 orang (100%) pengelola LKMA dan 25 orang (58,1%) anggota memberikan penilaian cukup. Hal ini disebabkan karena mekanisme insentif dan sanksi yang diberikan oleh pengelola LKMA kepada petani anggota belum mampu untuk membuat petani anggota menjadi disiplin dan teratur dalam mengembalikan pinjaman. Sanksi yang diberlakukan belum mampu membuat efek jera bagi anggota yang melakukan pembiayaan bermasalah.

Insentif yang diberikan oleh Gapoktan Karang Makmur terhadap anggotanya yang memiliki disiplin tinggi dalam hal pengembalian pinjaman adalah berupa penambahan jumlah pinjaman jika anggota tersebut akan melaksanakan akad/kredit pembiayaan berikutnya. Pemberian insentif ini nantinya akan mempengaruhi kelangsungan perguliran dana PUAP yang dikelola oleh Gapoktan Karang Makmur sehingga akan terus dapat dimanfaatkan secara luas dan merata oleh petani anggota gapoktan. Sebanyak 25 orang (58,1%) anggota menyatakan bahwa petani yang tidak pernah terlambat membayar angsuran atau membayar angsuran sebelum tanggal jatuh tempo, petani dapat dengan mudah meminta penambahan jumlah pinjaman bahkan pihak gapoktan yang terkadang justru menawarkan mengenai penambahan jumlah pinjaman tersebut jika petani melakukan peminjaman selanjutnya.

Berbeda dengan petani yang telat membayar atau bahkan petani yang menunggu ditagih terlebih dahulu baru mau membayar, gapoktan akan memberikan sanksi kepada petani yang demikian. Sanksi yang diberikan oleh Gapoktan Karang Makmur dilakukan secara bertahap sesuai dengan permasalahan keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh petani anggota. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak pengelola LKMA jika petani telat melakukan pembayaran pinjaman adalah:

1. Pengelola LKMA akan memberikan surat undangan yang berisi pemberitahuan bahwa telah jatuh tempo tanggal pembayaran pinjaman, dimana undangan tersebut dibuat setiap bulan dan diberikan kepada petani yang belum atau terlambat membayar angsuran pada bulan tersebut.

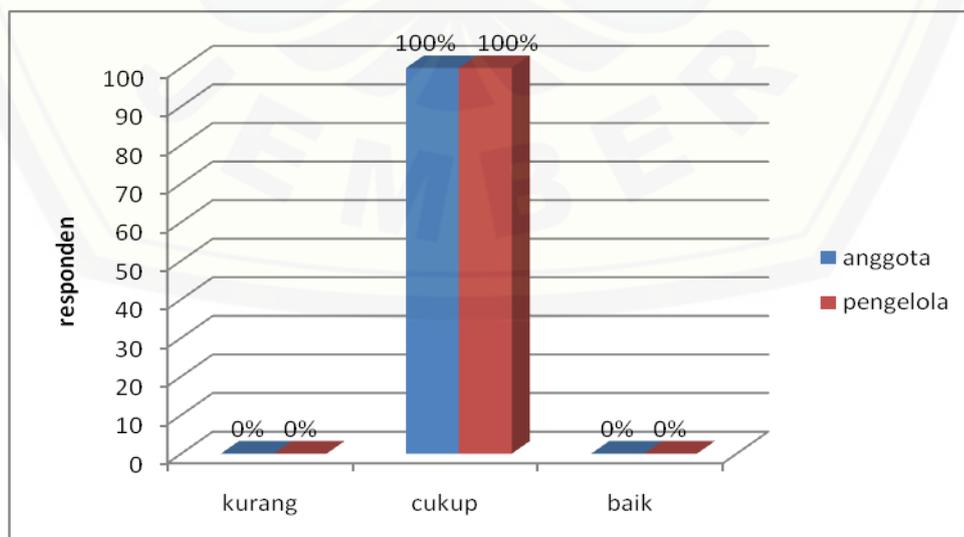
2. Jika setelah diberikan surat undangan petani belum juga melakukan pembayaran angsuran pinjaman pada bulan tersebut, maka langkah selanjutnya yang ambil oleh pengelola adalah teguran lisan secara langsung maupun melalui via sms atau telepon.
3. Jika teguran lisan tidak juga dihiraukan dan petani belum juga membayar angsuran pinjaman hingga 3 bulan, maka pada bulan ketiga keterlambatan, pihak pengelola LKMA akan melakukan teguran secara langsung yang dilakukan dengan mendatangi rumah petani anggota tersebut. Pengelola LKMA akan menanyakan kepada petani penyebab terlambatnya melakukan pembayaran dan memberikan solusi berupa penambahan waktu pembayaran pinjaman sehingga petani dapat melunasi pinjamannya dengan melakukan pembayaran angsuran dalam jumlah yang lebih sedikit.

Sanksi tersebut dilakukan oleh Gapoktan Karang Makmur dengan tujuan untuk memberikan sanksi moral berupa rasa malu dan jerah karena selalu ditagih sehingga dapat membentuk petani agar memiliki rasa tanggungjawab dan disiplin tinggi untuk melakukan pembayaran pinjaman demi menjaga keberlangsungan perguliran dana PUAP yang dikelola oleh Gapoktan Karang Makmur. Pemberian sanksi digunakan sebagai upaya agar dana PUAP yang telah dipinjam oleh petani tetap dapat dikembalikan dan dilunasi sehingga dana PUAP yang dikelola oleh Gapoktan Karang Makmur dapat terus berkembang. Pengelola juga menambahkan jika selama ini belum ada petani yang terlambat membayar hingga lebih dari 3 bulan, kecuali dikarenakan gagal panen. Jika keterlambatan pembayaran terjadi karena gagal panen maka pembayaran angsuran dapat langsung dijadikan satu pada musim panen berikutnya. Adapun hal-hal yang dapat menyebabkan terlambatnya pembayaran angsuran yang dilakukan oleh petani meliputi: rendahnya kesadaran petani untuk mengembalikan hutang, gagal panen, usaha tidak lancar dan penyalahgunaan kredit.

5.1.8 Sarana dan Prasarana LKMA

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan, sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang dapat bergerak atau berpindah seperti komputer dan mesin-mesin, sedangkan prasarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang tidak bergerak seperti gedung, ruang dan tanah. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas yang baik, sangat dibutuhkan setiap organisasi dimanapun dalam menyelenggarakan kegiatannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tanpa adanya sarana dan prasarana, mustahil tujuan akan dapat dicapai. Demikian halnya kantor, tempat berlangsungnya kegiatan yang berkaitan dengan ketatausahaan atau administrasi yang sangat memerlukan sarana dan prasarana kantor.

Kantor pelayanan untuk anggota/masyarakat yang standar dan memenuhi syarat sudah menjadi keharusan dan penting bagi gapoktan PUAP menuju lembaga keuangan mikro. Penampilan kantor harus dapat menunjukkan dan meyakinkan petani/masyarakat sebagai nasabah penabung atau yang akan mempercayakan dananya dikelola oleh gapoktan dan dapat menghasilkan laba. Berikut merupakan grafik hasil analisis penilaian kinerja gapoktan pada indikator sarana dan prasarana LKMA.



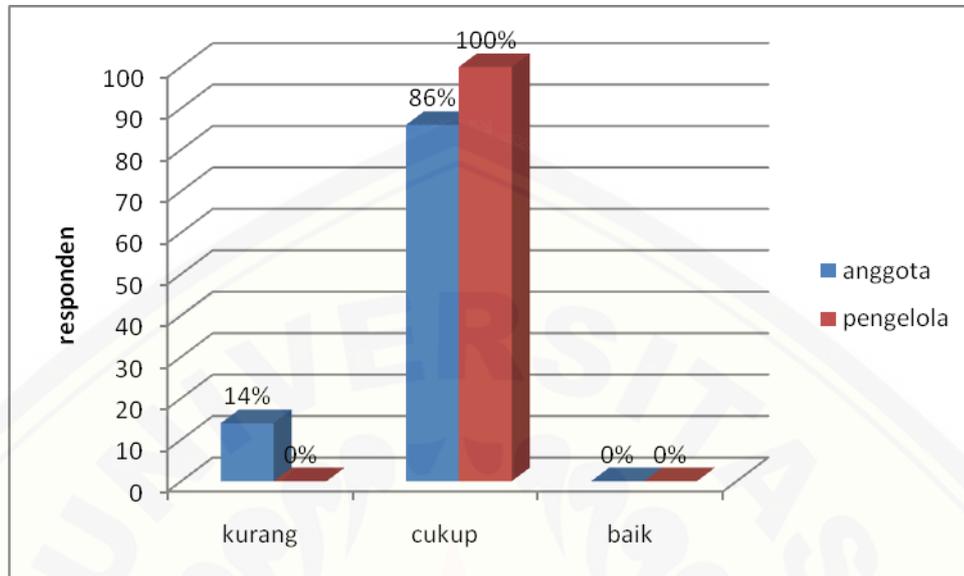
Gambar 5.8 Grafik Penilaian Sarana dan Prasarana LKMA (Sumber: Lampiran M, 92)

Berdasarkan Gambar 5.8 dapat diketahui bahwa total responden memberikan penilaian cukup terhadap kinerja Gapoktan Karang Makmur pada indikator sarana dan prasarana LKMA. Sarana dan prasarana LKMA dinilai cukup disebabkan karena kantor LKMA yang dimiliki oleh Gapoktan Karang Makmur masih memiliki keterbatasan dalam sarana yang dimiliki. Secara umum, sarana dan prasarana penunjang yang dimiliki oleh Gapoktan Karang Makmur masih kurang. Kantor kesekretariatan gapoktan masih berstatus menumpang di rumah ketua gapoktan, sedangkan untuk kantor LKMA berada pada kompleks Balai Desa Karangbendo. Kantor LKMA memiliki luas 5 meter x 3 meter dengan perabot kantor yang tersedia meliputi kursi, meja, lemari dan papan tulis. Peralatan/perlengkapan kantor LKMA dalam mengelola dana PUAP menggunakan buku-buku untuk pencatatan transaksi keuangan yang terdiri dari buku kas masuk, buku kas keluar serta buku pinjaman. Gapoktan Karang Makmur sudah memiliki laptop dan printer sendiri, namun belum mempunyai sarana penunjang lainnya seperti LCD. Mesin-mesin kantor yang juga telah dimiliki oleh gapoktan meliputi: kalkulator, alat scan uang dan flashdisk (Lampiran N, 92), sedangkan untuk alat komunikasi dan kendaraan operasional masih menggunakan fasilitas milik pribadi pengurus maupun pengelola LKMA. Hal tersebut dilakukan karena adanya keterbatasan sarana yang disebabkan karena kurangnya modal yang dimiliki oleh Gapoktan Karang Makmur.

5.1.9 Pelaporan

Pelaporan yang disusun oleh pengelola LKMA berupa laporan penyaluran dana PUAP dari gapoktan kepada kelompok tani dan dari kelompok tani kepada anggota serta laporan perkembangan usaha pada masing-masing anggota kelompok tani. Pelaporan tersebut kemudian diserahkan kepada gapoktan selaku pengawas bagi pengelola LKMA dan diinformasikan kepada petani anggota yang tergabung dalam Gapoktan Karang Makmur melalui pendataan perkembangan usaha anggota yang dilakukan oleh ketua kelompok tani masing-masing. Ketua kelompok tani dipilih atas dasar pertimbangan bahwa ketua kelompok tani dinilai lebih memahami anggota kelompoknya jika dibandingkan dengan pengelola

LKMA. Berikut merupakan grafik hasil analisis penilaian kinerja gapoktan pada indikator pelaporan.



Gambar 5.9 Grafik Penilaian Pelaporan (Sumber: Lampiran O, 93)

Berdasarkan Gambar 5.9 dapat diketahui bahwa sebanyak 2 orang (100%) pengelola LKMA dan 37 orang (86%) anggota memberikan penilaian cukup terhadap kinerja Gapoktan Karang Makmur dalam melakukan pelaporan. Pelaporan dinilai cukup disebabkan karena pelaporan yang dibuat oleh Gapoktan Karang Makmur tidak rutin dilakukan. Pelaporan seharusnya dibuat setiap bulan sekali, akan tetapi pelaporan bulanan tersebut hanya dibuat pada awal berjalannya program PUAP. Saat ini pelaporan hanya dibuat setahun sekali yaitu pada waktu RAT gapoktan, sedangkan sebanyak 6 orang (14%) anggota memberikan penilaian kurang. Hal ini disebabkan karena petani tidak mengetahui adanya pelaporan yang disebabkan keterlambatan atau ketidakhadiran pada waktu RAT berlangsung.

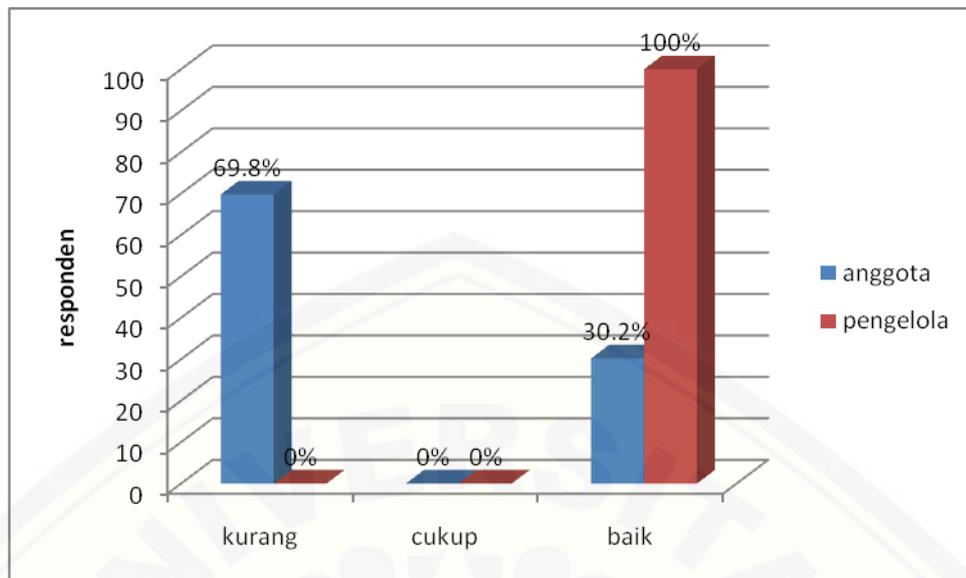
Pengelola LKMA menyatakan bahwa pelaporan keuangan awalnya dibuat setiap bulan pada tahun pertama penyaluran dana PUAP, namun pada tahun-tahun berikutnya pelaporan hanya dibuat ketika RAT yaitu sebagai Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pengurus gapoktan terhadap pengelolaan dana PUAP. Hal tersebut dilakukan karena tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Desa, namun pengelola menambahkan bahwa jika suatu waktu diminta

oleh pihak tersebut, maka pengelola LKMA dan pengurus Gapoktan Karang Makmur mengaku siap untuk membuat laporan karena setiap transaksi penyaluran dan pembayaran dana PUAP telah dicatat dan dibukukan oleh pengelola LKMA. Pengelola LKMA menyatakan bahwa Kepala Desa cenderung lepas tangan terhadap tugas yang diberikan oleh pemerintah selaku Pembina dan pengawas sebagaimana telah disebutkan dalam pedoman umum PUAP. Lemahnya pengawasan tersebut menyebabkan Gapoktan Karang Makmur tidak disiplin dalam membuat laporan keuangan secara teratur setiap bulannya. Pembuatan laporan keuangan gapoktan dirangkap sebagai laporan tahunan pada saat LPJ pengurus waktu RAT.

Sebanyak 37 orang (86%) anggota menyatakan bahwa pelaporan yang dibuat oleh pihak gapoktan mengenai penyaluran dana PUAP hanya dilakukan pada saat awal tahun berjalannya program, setelah itu tidak ada lagi pelaporan yang diterima oleh anggota baik pelaporan mengenai penyaluran dana maupun perkembangan usaha. Pelaporan hanya diinformasikan setahun sekali yaitu pada saat RAT berlangsung. Sebagian besar anggota membenarkan jika pelaporan yang dibuat oleh pihak gapoktan hanya dilakukan pada saat RAT, namun ada juga dari beberapa anggota yang mengaku tidak mengetahui adanya pelaporan pada saat RAT. Hal tersebut dikarenakan alasan yang diakui oleh anggota jika ketidaktahuannya disebabkan oleh keterlambatan atau ketidakhadiran pada saat RAT berlangsung.

5.1.10 Pengawasan Pembiayaan

Pengawasan pembiayaan dilakukan oleh pengelola LKMA kepada petani anggota yang sudah melakukan akad kredit/pembiayaan dana PUAP. Pengawasan pembiayaan dimaksudkan untuk pengawalan dana sehingga dapat bermanfaat sesuai usulan dan petani mampu mengembalikannya. Berikut merupakan grafik hasil analisis penilaian kinerja gapoktan pada indikator pengawasan pembiayaan.



Gambar 5.10 Grafik Penilaian Pengawasan Pembiayaan (Sumber: Lampiran P, 93)

Berdasarkan Gambar 5.10 dapat diketahui bahwa sebanyak sebanyak 2 orang (100%) pengelola LKMA dan 13 orang (30,2%) anggota memberikan penilaian baik terhadap kinerja Gapoktan Karang Makmur dalam melakukan pengawasan pembiayaan. Pengawasan pembiayaan dinilai baik disebabkan karena pengawasan yang dilakukan oleh Gapoktan Karang Makmur mampu mengembalikan dana PUAP tepat waktu dari petani anggota. Pengawasan pembiayaan dilakukan atas dasar ada tidaknya masalah dalam pembayaran angsuran yang dilakukan oleh petani anggota kepada gapoktan, sedangkan sebanyak 30 orang (69,8%) anggota memberikan penilaian kurang. Hal ini disebabkan karena ketidaktahuan dari anggota jika pengawasan yang dilakukan oleh Gapoktan Karang Makmur dilakukan atas dasar ada tidaknya masalah dalam pembayaran angsuran yang dilakukan oleh petani anggota kepada gapoktan. Menurut 30 orang (69,8%) anggota, selama ini tidak ada bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak pengelola LKMA maupun pengurus gapoktan mengenai penggunaan peminjaman dana PUAP tersebut, yang terpenting adalah bagaimana anggota dapat membayar angsuran dan melunasi pinjaman tepat waktu.

Penggolongan pembiayaan yang dilakukan oleh anggota berdasarkan AD/ART Gapoktan Karang Makmur meliputi:

1. Kredit lancar (pembayaran angsuran tepat waktu dan tidak ada tunggakan)

2. Kredit kurang lancar (terdapat tunggakan pembayaran angsuran belum melampaui 3 bulan)
3. Kredit macet (terdapat tunggakan pembayaran angsuran telah melampaui 3 bulan)

Bentuk pengawasan tersebut berupa peninjauan langsung ketempat usaha atau sawah petani anggota penerima dana PUAP. Peninjauan biasanya dilakukan oleh pengelola LKMA, meskipun terkadang juga tidak menutup kemungkinan pengurus turut melakukan peninjauan selaku pengawas pengelola LKMA untuk mengetahui kinerja pengelola LKMA dalam melakukan penyaluran dana PUAP kepada petani anggota Gapoktan Karang Makmur. Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung keadaan usaha petani anggota, apakah berjalan lancar atau mengalami hambatan serta melihat penggunaan dana pinjaman PUAP sesuai dengan RUA yang telah diajukan atau tidak. Apabila pengembalian kredit dari anggota sudah tidak tepat waktu atau kurang lancar maka gapoktan berupaya lebih giat untuk memberikan saran-saran dan melakukan pembinaan terhadap anggota agar usahanya dapat lebih berkembang. Pembinaan terhadap anggota yang masuk dalam golongan kurang lancar dilakukan lebih intensif dikarenakan kegiatan tersebut dapat mencegah kredit macet sejak dini, sehingga tidak akan ada pihak yang dirugikan dari kedua pihak antara gapoktan dan anggota gapoktan.

5.2 Pengelolaan Program PUAP

Salah satu program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah Indonesia adalah program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). Sebuah program yang telah dilaksanakan oleh para pelaksana tentunya memerlukan evaluasi untuk melihat sejauh mana tujuan program tersebut telah tercapai. Penilaian terhadap hasil suatu program dapat dilihat melalui tujuan atau indikator-indikator keberhasilan (*outcome*) terkait program yang dievaluasi. Dalam kegiatan evaluasi diperlukan suatu indikator. Indikator menurut Nawawi (2013) dapat didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah

ditetapkan. Tanpa indikator, akan sulit untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan program.

Setelah berjalan selama tiga tahun program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Desa Karangbendo Kabupaten Lumajang telah memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh petani anggota Gapoktan Karang Makmur. Namun, dalam pelaksanaannya masih ada temuan-temuan yang menunjukkan bahwa program PUAP masih perlu pendampingan dan pengembangan. Evaluasi mengenai pengelolaan program PUAP di Desa Karangbendo dinilai oleh 4 informan yang terdiri dari ketua gapoktan, manajer LKMA, kasir LKMA dan PPL. Untuk melihat hasil dari evaluasi tersebut peneliti menggunakan tiga indikator keberhasilan (*outcome*) program PUAP yaitu sebagai berikut:

5.2.1 Peningkatan Kemampuan Gapoktan dalam Mengelola Bantuan Modal Usaha untuk Petani Anggota

Gapoktan sebagai lembaga pelaksana dan pengelola program PUAP bertanggungjawab dalam menyalurkan dana BLM PUAP dengan prosedur pemberian kredit yang mudah kepada petani anggota yang selama ini mengalami kesulitan dalam pemenuhan permodalan usahanya. Modal merupakan faktor penting dalam menjalankan suatu usaha. Apabila dalam pemenuhan modal terdapat kendala, maka akan mempengaruhi jalannya suatu usaha. Gapoktan Karang Makmur sebagai lembaga pelaksana dan pengelola program PUAP di Desa Karangbendo Kabupaten Lumajang telah berhasil dalam mengelola bantuan modal usaha PUAP untuk petani anggota baik pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani. Keberhasilan gapoktan dalam mengelola program PUAP dilihat dari kemampuan gapoktan dalam menghimpun modal keswadayaan dan meningkatkan asset Gapoktan Karang Makmur.

Modal keswadayaan merupakan modal gapoktan yang berhasil diorganisir dan dikumpulkan dari simpanan anggota. Penggalangan dana keswadayaan oleh Gapoktan Karang Makmur dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela merupakan alat ukur utama dalam menentukan kemandirian

gapoktan. Dana keswadayaan yang berhasil dikumpulkan oleh gapoktan digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota. Jumlah modal keswadayaan yang berhasil dikumpulkan oleh Gapoktan Karang Makmur mencapai Rp4.065.000 dengan jumlah anggota sebanyak 173 petani.

Aset gapoktan merupakan kekayaan gabungan kelompok tani (Gapoktan) yang berasal dari dana keswadayaan (simpanan), dana cadangan dan dana penyertaan pemerintah yang dikelola untuk kepentingan anggota dan kelompok. Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian gapoktan jika diperlukan. Pertumbuhan aset yang dikelola oleh gapoktan dapat menjadi ukuran keberhasilan pengurus dan pengelola dalam meyakinkan masyarakat serta anggota untuk menipkan dana keswadayaan kepada gapoktan. Peningkatan kemampuan gapoktan dalam mengelola dan mengembangkan dana BLM PUAP mampu meningkatkan jumlah aset yang dimiliki oleh gapoktan. Aset Gapoktan Karang Makmur berasal dari pengelolaan dana PUAP, kas, piutang, inventaris dan simpanan anggota gapoktan. Dana BLM PUAP yang diberikan oleh pemerintah kepada Gapoktan Karang Makmur sebagai modal awal dengan jumlah Rp100.000.000 pada tahun 2012, setelah dilakukan perguliran oleh gapoktan kepada anggota, jumlah dana yang berhasil dikelola dan dikumpulkan meningkat menjadi Rp122.392.000 terhitung per September 2015. Peningkatan aset gapoktan dapat dilihat pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2 Asset Gapoktan Karang Makmur Desa Karangbendo Kabupaten Lumajang Tahun 2015

No	Program PUAP (Tahun)	Jumlah Asset (Rp)
1	2012	100.000.000
2	2013	108.923.300
3	2014	117.826.000
4	2015	122.392.000

Sumber: Laporan Gapoktan Karang Makmur Tahun 2015

Disamping peningkatan aset gapoktan, keberhasilan lain dalam pengelolaan dana PUAP oleh gapoktan juga terlihat dari peningkatan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dikumpulkan oleh Gapoktan Karang Makmur. Peningkatan

SHU tersebut yaitu pada tahun 2013 diperoleh SHU sebesar Rp7.174.300, tahun 2014 sebesar Rp7.613.700 dan tahun 2015 sebesar Rp8.053.100. Peningkatan Sisa Hasil Usaha (SHU) dapat dilihat pada Tabel 5.3.

Tabel 5.3 Sisa Hasil Usaha (SHU) Gapoktan Karang Makmur Desa Karangbendo Kabupaten Lumajang Tahun 2015

No	Program PUAP (Tahun)	Jumlah SHU (Rp)
1	2012	0
2	2013	7.174.300
3	2014	7.613.700
4	2015	8.053.100

Sumber: Laporan Gapoktan Karang Makmur Tahun 2015

Penyaluran bantuan modal usaha PUAP kepada petani anggota yang dilakukan oleh Gapoktan Karang Makmur menetapkan adanya biaya administrasi sebesar 0,5% dari jumlah pinjaman yang diberikan untuk setiap kali peminjaman dan biaya jasa/bunga sebesar 2% per bulan. Pendapatan yang diperoleh dari biaya administrasi dan bunga tersebut digunakan gapoktan untuk berbagai keperluan biaya, meliputi: biaya Alat Tulis Kantor (ATK), biaya konsumsi, biaya gaji karyawan, biaya transport pengurus dan biaya lain-lain. Biaya ATK yang dikeluarkan oleh Gapoktan Karang Makmur digunakan untuk membeli perlengkapan kantor, meliputi: fotokopi, map, *flashdisk*, alat scan uang, buku, pulpen, printer dan laptop. Biaya konsumsi Gapoktan Karang Makmur digunakan untuk membeli konsumsi kantor maupun konsumsi pada saat rapat. Biaya gaji karyawan diberikan sebagai upah pengelola LKMA selaku karyawan Gapoktan Karang Makmur. Biaya transport pengurus dikeluarkan oleh Gapoktan Karang Makmur sebagai biaya yang digunakan untuk keperluan transportasi pengurus, mengingat gapoktan masih belum memiliki kendaraan operasional sehingga pengurus menggunakan kendaraan milik pribadi masing-masing. Biaya lain-lain merupakan biaya yang tidak di anggarkan oleh gapoktan. Biaya tersebut merupakan biaya yang jumlah dan waktunya tidak ditetapkan, meliputi: tunjangan hari raya dan kontribusi bantuan desa (kegiatan sedekah desa).

5.2.2 Peningkatan Jumlah Petani dan Rumah Tangga Tani yang Mendapatkan Bantuan Modal Usaha

Salah satu tujuan program PUAP adalah untuk meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan. Sesuai dengan tujuan tersebut, Gapoktan Karang Makmur sebagai salah satu lembaga ekonomi perdesaan yang dimiliki oleh petani telah melakukan tugasnya dalam menyalurkan BLM PUAP kepada petani anggota, baik petani pemilik, penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani. Sebelum disalurkan kepada anggota gapoktan, dana PUAP dicairkan terlebih dahulu dari rekening gapoktan secara bertahap, yaitu melalui 3 kali tahap pencairan dana. Hal tersebut disesuaikan dengan arahan dari Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan dana PUAP oleh gapoktan.

Tahap pertama pencairan dana BLM PUAP dilakukan penarikan dari rekening gapoktan sebesar Rp33.500.000. Pencairan tersebut dilakukan pada tanggal 28 Desember 2012. Pencairan kedua dilakukan pada tanggal 23 Januari 2013 sebanyak Rp42.000.000 dan pencairan ketiga dilakukan pada tanggal 1 Agustus 2013 dengan nominal penarikan sebanyak Rp24.500.000 (Lampiran Q, 94). Total penarikan disesuaikan dengan jumlah kebutuhan biaya yang akan diperlukan oleh masing-masing anggota gapoktan pada waktu itu.

Peningkatan jumlah petani yang melakukan akad pembiayaan dana BLM PUAP menjadi prestasi tersendiri bagi Gapoktan Karang Makmur sebagai lembaga pengelola dan pelaksana program PUAP. Hal ini dikarenakan semakin banyak jumlah petani yang melakukan peminjaman, maka jangkauan modal yang dapat disalurkan oleh gapoktan juga semakin luas. Meluasnya jangkauan modal menunjukkan bahwa dana BLM PUAP yang dikelola oleh Gapoktan Karang Makmur semakin meningkat dan berkembang.

Tahap awal pencairan dana BLM PUAP, penyaluran dana oleh Gapoktan Karang Makmur kepada petani anggota hanya mampu menjangkau sebanyak 35 petani. Gapoktan membatasi jumlah peminjaman pada saat itu, yaitu mulai dari Rp500.000 sampai Rp1.000.000. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar dana

yang tersalurkan dapat merata kepada anggota. Dana pada tahap awal pencairan telah disalurkan semua, kemudian terdapat penambahan anggota baru yang juga ingin melakukan akad pembiayaan kepada gapoktan. Gapoktan Karang Makmur melakukan pencairan dana BLM PUAP yang kedua. Jumlah anggota yang terdaftar menjadi nasabah meningkat menjadi 77 anggota. Dana BLM PUAP yang telah dicairkan oleh gapoktan kemudian disalurkan dengan rata-rata nominal Rp500.000 sampai Rp1000.000 untuk masing-masing petani. Dana BLM PUAP pada tahap kedua juga telah tersalurkan semua, sehingga Gapoktan Karang Makmur melakukan pencairan dana BLM PUAP tahap ketiga. Pencairan dana BLM PUAP yang ketiga ini digunakan untuk membiayai petani anggota baru dan petani anggota lama yang akan melakukan akad pembiayaan lagi. Seiring berjalannya program dari tahun ke tahun disertai dengan peningkatan modal yang dikelola, maka pemberian pinjaman dana BLM PUAP juga dapat ditingkatkan sesuai dengan ketersediaan modal yang terdapat pada Gapoktan Karang Makmur.

Dana BLM PUAP yang masuk dalam rekening Gapoktan Karang Makmur dari pemerintah telah seluruhnya disalurkan kepada petani anggota. Penyaluran dana BLM PUAP oleh gapoktan dilakukan dengan mengajukan persyaratan terlebih dahulu bagi petani yang akan melakukan akad kredit atau pembiayaan. Persyaratan tersebut meliputi:

- a. Petani telah terdaftar menjadi anggota Gapoktan Karang Makmur
- b. Membayar simpanan pokok sebesar Rp5000 setiap anggota
- c. Membayar simpanan wajib sebesar Rp1000 setiap bulan
- d. Menyerahkan fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- e. Menyerahkan Rencana Usaha Anggota (RUA)
- f. Menandatangani surat pernyataan pengakuan hutang

Adapun syarat yang ditetapkan oleh Gapoktan Karang Makmur tersebut terbilang mudah. Hal ini tentunya tidak akan menyulitkan bagi petani, karena pada dasarnya program PUAP bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi petani dalam memperoleh modal usaha. Pemberian pinjaman dana BLM PUAP oleh Gapoktan Karang Makmur tidak menggunakan agunan atau jaminan apapun. Modal sosial berupa kepercayaan antara pengurus gapoktan, pengelola LKMA

serta petani anggota Gapoktan Karang Makmur yang selama ini diterapkan dan dijunjung tinggi agar usaha simpan pinjam yang dikelola dapat terus berjalan dan berkembang.

Perputaran modal PUAP menjadi tanggung jawab gapoktan agar dapat terus berkembang dan meningkat. Semakin bertambah jumlah modal PUAP maka akan menambah jumlah petani anggota yang dapat merasakan manfaat adanya dana BLM PUAP tersebut. Jumlah anggota penerima dana BLM PUAP mulai dari awal pencairan dana yaitu Januari tahun 2013 sebanyak 77 petani hingga saat ini terhitung per September 2015 mencapai 173 petani.

Tabel 5.4 Peningkatan Jumlah Petani Penerima Dana BLM PUAP Gapoktan Karang Makmur Desa Karangbendo Kabupaten Lumajang Tahun 2015

No	Program PUAP (Tahun)	Dana PUAP (Rp)	Jumlah Anggota (Orang)	Peminjam (Orang)	Persentase(%)
1	2012	100.000.000	793	0	0,0
2	2013	108.923.300	793	147	18,5
3	2014	117.826.000	793	159	20,1
4	2015	122.392.000	793	173	21,8

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2015 (Lampiran R, 94)

Berdasarkan Tabel 5.4 dapat diketahui bahwa adanya peningkatan jumlah petani anggota yang menerima bantuan dana BLM PUAP tersebut belum menunjukkan bahwa Gapoktan Karang Makmur sebagai lembaga pelaksana dan pengelola program PUAP mampu memberikan kesempatan kepada petani untuk dapat memperoleh kemudahan dalam akses permodalan. Hal tersebut dikarenakan peningkatan jumlah petani anggota yang menerima dana BLM PUAP masih sangat sedikit. Terhitung 173 per September 2015 dari seluruh jumlah petani yang tergabung pada Gapoktan Karang Makmur Desa Karangbendo yaitu sebanyak 793, artinya masih 21,8% petani yang dapat memanfaatkan adanya BLM PUAP. Minimnya jumlah peningkatan petani anggota yang dapat memanfaatkan adanya BLM PUAP disebabkan karena terbatasnya dana BLM PUAP yang dimiliki dan dikelola oleh Gapoktan Karang Makmur, sehingga perputaran modal yang ada pada Gapoktan Karang Makmur disalurkan dengan mendahulukan petani anggota lama.

5.2.3 Peningkatan Kegiatan Usaha Agribisnis (Hulu, Budidaya dan Hilir) di Perdesaan

Pertanian dipandang sebagai suatu sistem yang dinamakan agribisnis. Agribisnis adalah bisnis berbasis usaha pertanian atau bidang lain yang mendukung, baik di sektor hulu maupun di hilir. Program PUAP yang dilaksanakan dan dikelola oleh Gapoktan Karang Makmur belum mampu meningkatkan aktivitas kegiatan usaha agribisnis di Desa Karangbendo Kabupaten Lumajang. Peningkatan aktivitas kegiatan agribisnis hanya terjadi pada sektor hulu dan budidaya. Adanya peningkatan kegiatan agribisnis di sektor hulu dan budidaya ini tidak terlepas dari peran Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) sebagai pendamping gapoktan dalam melaksanakan program PUAP. PPL dalam hal ini bertugas memberikan pembinaan dan informasi. Adapun pembinaan yang diberikan mencakup pembinaan teknis aspek budidaya pertanian bagi petani anggota Gapoktan Karang Makmur. Jika dilihat berdasarkan konsep agribisnis pada program PUAP, agribisnis digambarkan sebagai sebuah sistem yang terdiri atas beberapa subsistem yaitu sebagai berikut:

1. Subsistem hulu

Subsistem pengadaan dan penyaluran berbagai sarana produksi pertanian, seperti: bibit, benih, pupuk, obat-obatan, alat mesin pertanian dan kredit. Peningkatan kegiatan subsistem hulu pada kegiatan agribisnis di Desa Karangbendo dapat dilihat dari adanya bantuan-bantuan saprodi yang diterima oleh Gapoktan Karang Makmur sebagai bentuk program bantuan usaha pertanian yang diberikan oleh pemerintah. PPL sebagai petugas lapangan dalam hal ini bertugas untuk memberikan informasi mengenai adanya bantuan saprodi yang berasal dari program bantuan pemerintah tersebut. Bantuan yang diterima oleh Gapoktan Karang Makmur diharapkan dapat mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh petani anggota gapoktan dalam menjalankan usaha taninya. Salah satu faktor yang mempengaruhi diperolehnya bantuan dari pemerintah tersebut adalah kemampuan gapoktan dalam mengembangkan bantuan dana BLM PUAP. Kemampuan mengelola dana PUAP memberikan nilai tambah tersendiri bagi Gapoktan Karang Makmur untuk dapat

dipertimbangkan sebagai gapoktan penerima bantuan dari pemerintah. Bantuan yang telah diterima oleh Gapoktan Karang Makmur berupa alat mesin pertanian yaitu mesin tanam benih (*transplanter*), sedangkan kelompok tani mendapatkan bantuan saprodi berupa benih, pupuk, obat dan alat mesin pertanian berupa *hand traktor*.

2. Subsistem budidaya

Subsistem kegiatan produksi dalam usaha tani yang menghasilkan berbagai produk pertanian seperti bahan pangan, sayuran dan telur. Peningkatan kegiatan agribisnis pada subsistem budidaya ditunjukkan dengan adanya pemanfaatan dana BLM PUAP yang diterima oleh petani anggota. Dana BLM PUAP dapat digunakan sebagai tambahan modal untuk memenuhi kebutuhan saprodi yang tidak diperoleh dari program bantuan pemerintah ataupun tambahan biaya untuk tenaga kerja yang digunakan untuk menggarap sawah. Peningkatan subsistem budidaya juga ditunjukkan dengan adanya aktivitas pembinaan. PPL memberikan pembinaan bagi anggota Gapoktan Karang Makmur pada sektor budidaya mengenai teknis budidaya usaha yang akan dilakukan. Adapun pembinaan yang diberikan oleh PPL kepada petani anggota Gapoktan Karang Makmur berupa himbauan untuk menggunakan pupuk organik dalam usaha taninya, penggunaan benih unggul bersertifikat dan pemupukan berimbang sesuai dengan sigarpunbulat untuk meningkatkan hasil produksi padi, penggunaan sistem tanam jajar legowo ataupun bedengan, pembersihan saluran air agar tidak terjadi banjir serta pembagian air oleh tuwowo pada saat musim kemarau. Himbauan tersebut disampaikan dengan tujuan untuk dapat meningkatkan produksi yang dihasilkan dari usaha budidaya yang dilakukan oleh petani.

3. Subsistem hilir

Subsistem pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyaluran berbagai produk pertanian yang dihasilkan usaha tani atau hasil olahannya ke konsumen. Adanya program PUAP yang dikelola oleh Gapoktan Karang Makmur di Desa Karangbendo belum mampu meningkatkan kegiatan agribisnis pada sektor hilir. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya

peningkatan kegiatan subsistem hilir seperti pengolahan, penyimpanan maupun pemasaran yang dilakukan oleh gapoktan. Hasil panen yang diperoleh dari usaha tani petani anggota Gapoktan Karang Makmur langsung dijual ke konsumen atau penimbang besar. Tidak adanya aktivitas hilir yang diberikan pada hasil panen usaha tani petani disebabkan oleh kurangnya modal usaha yang dimiliki oleh gapoktan dan masih belum tersedianya fasilitas penunjang yang diperlukan oleh petani seperti lantai jemur, gudang penyimpanan dan mesin penggiling untuk padi. Hal tersebut yang menyebabkan petani tidak mau melakukan aktivitas hilir, belum lagi adanya tambahan biaya dan tenaga yang harus dikeluarkan oleh petani. Petani lebih memilih untuk menjual hasil panennya langsung agar segera mendapatkan uang.

Kegiatan agribisnis di Desa Karangbendo dengan adanya program PUAP mengalami peningkatan pada aktivitas kegiatan subsistem hulu dan budidaya, namun belum ada peningkatan kegiatan untuk subsistem hilir. Hal ini disebabkan karena kurangnya modal usaha untuk melakukan pengolahan hasil budidaya. Menurut Suhardi (2012), keuntungan dari sisi budidaya hanya berkisar 21% sementara 79% keuntungan diperoleh dari sisi hilir (perdagangan). Jika ada, pengolahan hasil budidaya akan meningkatkan kesejahteraan petani, menambah nilai jual hasil budidaya serta dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran karena adanya penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis, sehingga salah satu tujuan program PUAP yaitu mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di perdesaan sesuai dengan potensi wilayah bisa tercapai.

BAB 6. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

1. Kinerja Gapoktan Karang Makmur sebagai lembaga pengelola program PUAP di Desa Karangbendo Kabupaten Lumajang berada pada kategori baik.
2. Pengelolaan program PUAP di Desa Karangbendo Kabupaten Lumajang berlangsung baik, namun untuk mencapai keberhasilan *outcome* program PUAP sebagaimana disebutkan dalam pedoman umum PUAP masih belum dapat direalisasikan secara keseluruhan, misalnya dalam hal peningkatan kegiatan usaha agribisnis pada subsistem hilir.

6.2 Saran

1. Pengelola LKMA dan pengurus gapoktan sebaiknya lebih teliti dalam menganalisis usaha anggota yang akan mengajukan pembiayaan yaitu dengan cara memperketat persyaratan pencairan dana BLM PUAP sehingga adanya pembiayaan bermasalah atau kredit macet dapat diminimalkan.
2. Mengingat masih banyaknya petani yang belum terdaftar sebagai anggota penerima dana BLM PUAP, sebaiknya pengurus gapoktan mewajibkan setiap petani untuk menjadi anggota LKMA sehingga dapat menambah modal dari simpanan pokok dan simpanan wajib.

DAFTAR PUSTAKA

- Baswir, Revrisond. 2000. *Koperasi Indonesia*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- BPS. 2013. *Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia*. Jakarta.
- BPS. 2013. *Jumlah Produksi Padi di Kabupaten Lumajang*. Jakarta.
- Bungin, Burhan. 2013. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dunn, William. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Endang R, Mulyani. 2010. *Modul Memahami Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran*. Jakarta: Erlangga.
- Fatma, Pastaliza. 2012. Evaluasi Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Kabupaten Solok. *Artikel*. Program Studi Magister Perencanaan Pembangunan Program Pasca Sarjana Universitas Andalas.
- Gerry. 2012. Pengaruh Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) terhadap Produksi Padi di Desa Sruni Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember. *Skripsi*. Jember. Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember.
- Hafinuddin. 2013. Hubungan Dinamika Gapoktan dengan Keberhasilan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan. *Jurnal Ilmu Pertanian dan Perikanan*. Vol. 2 No.2 Hal : 93-97.
- Handhikusuma. 2002. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Hawkins. 1999. *Penyuluhan Pertanian*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hendar. 1999. *Ekonomi Koperasi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Kementerian Pertanian. 2010. *Petunjuk Teknis Pemingkatan (Rating) Gapoktan PUAP Menuju LKM-A*. Jakarta.
- Martono, Nanang. 2012. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Mulyani. 2008. *Modul Memahami Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran*. Jakarta: Erlangga.

- Nawawi, Ismail. 2013. *Budaya Organisasi kepemimpinan dan Kinerja*. Jakarta: Kencana.
- Nazir. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nyla. 2013. Keberadaan Modal Sosial dan Strategi Pengembangan terhadap Pengelolaan Dana PUAP Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. *Skripsi*. Jember. Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember.
- Peraturan Menteri Pertanian. 2015. *Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)*. Jakarta: Deptan Press.
- Riduwan. 2005. *Skala Pengukuran Variable-Variabel Penelitian*. Bandung Alfabeta.
- Riva'i, Veithzal. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhardi. 2012. SDM Kunci Sukses Sektor Hilir [serial online]. <http://pertanian.jombangkab.go.id/berita-dinas/kbk-disperta/225-sdm-kunci-sukses-pembangunan-sektor-hilir>. [17 Januari 2016].
- Suryahadi, Asep. 2007. Kumpulan Bahan Latihan Pemantauan Evaluasi Program-Program Penanggulangan Kemiskinan. *Modul 4 : Persyaratan dan Unsur-Unsur Evaluasi yang Baik*. Bappenas. Jakarta. www.ditpk.bappenas.go.id.
- Syahyuti. 2004. Model Kelembagaan Penunjang Pengembangan Pertanian di Lahan Lebak. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian.
- Triane. 2012. Analisis Dampak Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (Studi Kasus Gapoktan Rukun Tani Desa Citapen Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor). *Tesis*. Jakarta. Program Magister Perencanaan Dan Kebijakan Public Universitas Indonesia.

Lampiran A. Data Responden Petani Anggota Gapoktan Karang Makmur di Desa Karangbendo Kabupaten Lumajang

No	Nama Responden	Alamat	Kelompok Tani	Umur	Kredit (Kali)	Pendidikan Terakhir	Jumlah Anggota Keluarga	Pekerjaan	Luas Lahan (Ha)
1	Ahmad Sueb	Dusun Pasinan Rw 11	Pasinan Muda I	41	2	SMP	4	Petani	0,25
2	Eliyah	Dusun Pasinan Rw 11	Pasinan Muda I	33	3	SMP	3	Pedagang	0,2
3	Mujiono	Dusun Pasinan Rw 9	Pasinan Muda I	43	2	SMA	4	Petani	0,2
4	Misnanti	Dusun Pasinan Rw 9	Pasinan Muda I	35	2	SMA	3	Petani	0,3
5	Jumaati	Dusun Pasinan Rw 9	Pasinan Muda I	36	1	SMP	4	Pedagang	0,2
6	Maimunah	Dusun Pasinan Rw 9	Pasinan Muda I	58	1	SD	4	Petani	0,25
7	Buati	Dusun Pasinan Rw 11	Pasinan Muda I	43	3	SMP	3	Pedagang	0,25
8	Tuplik Khasanah	Dusun Pasinan Rw 11	Pasinan Muda I	37	3	SD	5	Petani	0,2
9	Jumadi	Dusun Tego Rw 4	Pasinan Muda II	34	1	SMP	5	Petani	0,3
10	Ponari	Dusun Tego Rw 5	Pasinan Muda II	40	3	SD	3	Pedagang	0,3
11	Sarinah	Dusun Tego Rw 5	Pasinan Muda II	55	1	SD	5	Petani	0,4

Lampiran A1. Lanjutan Data Responden Petani Anggota Gapoktan Karang Makmur di Desa Karangbendo Kabupaten Lumajang

No	Nama Responden	Alamat	Kelompok Tani	Umur	Kredit (Kali)	Pendidikan Terakhir	Jumlah Anggota Keluarga	Pekerjaan	Luas Lahan (Ha)
12	Karimah Ningsih	Dusun Tego Rw 3	Pasinan Muda II	38	1	SMA	3	Petani	0,3
13	Hasanah	Dusun Pasinan Rw 11	Pasinan Muda II	36	1	SD	4	Pedagang	0,3
14	Sukirman	Dusun Tego Rw 5	Pasinan Muda II	46	3	SMA	4	Petani	0,4
15	Solikan	Dusun Tego Rw 4	Pasinan Muda II	52	2	SMP	5	Petani	0,4
16	Samitri	Dusun Tego Rw 5	Pasinan Muda II	67	1	SD	5	Petani	0,25
17	Maria Ulfa	Dusun Tego Rw 5	Pasinan Muda II	43	1	SMP	4	Pedagang	0,2
18	Sunaini	Dusun Tego Rw 5	Pasinan Muda II	56	1	SD	3	Petani	0,2
19	Nur Hasan	Dusun Krajan Rw 3	Karya Harapan I	65	3	SMA	3	Petani	0,2
20	H. Sayudi	Dusun Krajan Rw 4	Karya Harapan I	60	1	SD	4	Petani	1,5
21	Abd. Rohman	Dusun Tego Rw 2	Karya Harapan I	44	3	SMP	3	Peternak	0,5
22	H. Karto	Dusun Besukan Rw 4	Karya Harapan I	64	1	SMP	5	Petani	0,5

Lampiran A2. Lanjutan Data Responden Petani Anggota Gapoktan Karang Makmur di Desa Karangbendo Kabupaten Lumajang

No	Nama Responden	Alamat	Kelompok Tani	Umur	Kredit (Kali)	Pendidikan Terakhir	Jumlah Anggota Keluarga	Pekerjaan	Luas Lahan (Ha)
23	Amiri	Dusun Krajan Rw 3	Karya Harapan I	49	3	SMP	4	Petani	0,4
24	Abd. Kholiq	Dusun Tego Rw 5	Karya Harapan I	59	2	SMP	3	Petani	0,3
25	Heri Wahyudi	Dusun Besukan Rw 2	Karya Harapan I	38	1	SMA	4	Petani	0,4
26	Hanik Indra S.	Dusun Pasinan Rw 11	Karya Harapan I	30	1	SMP	2	Petani	0,4
27	Mulyono	Dusun Sekarwadung Rw 9	Karya Harapan II	39	3	SMP	3	Pedagang	0,2
28	Mulyadi	Dusun Sekarwadung Rw 10	Karya Harapan II	41	3	SMP	4	Petani	0,3
29	H. Sariyono	Dusun Krajahn Rw 6	Karya Harapan II	65	3	SMA	3	Petani	2
30	Illawati	Dusun Sekarwadung Rw 7	Karya Harapan II	30	2	SMA	2	Peternak	0,5
31	Sri Hartini	Dusun Sekarwadung Rw 7	Karya Harapan II	36	3	SMP	5	Pedagang	0,5
32	M. Solikhin	Dusun Krajan Rw 8	Karya Harapan II	63	3	SD	5	Petani	0,2
33	Sanirah	Dusun Sekarwadung Rw 7	Karya Harapan II	54	1	SD	5	Petani	0,3

Lampiran A3. Lanjutan Data Responden Petani Anggota Gapoktan Karang Makmur di Desa Karangbendo Kabupaten Lumajang

No	Nama Responden	Alamat	Kelompok Tani	Umur	Kredit (Kali)	Pendidikan Terakhir	Jumlah Anggota Keluarga	Pekerjaan	Luas Lahan (Ha)
34	H. Maimunah	Dusun Sekarwadung Rw 7	Karya Harapan II	57	3	SMP	4	Petani	1
35	Subandi	Dusun Sekarwadung Rw 7	Karya Harapan II	42	3	SMA	5	Petani	0,4
36	H. Sudirjo	Dusun Tego Rw 5	Klapan Jati	48	3	SMA	5	Petani	1,5
37	Subadar	Dusun Besukan Rw 2	Klapan Jati	58	3	SMP	2	Petani	0,4
38	Supaat	Dusun Besukan Rw 2	Klapan Jati	67	1	SD	3	Petani	0,25
39	Kasil Efendi	Dusun Besukan Rw 1	Klapan Jati	42	2	SD	3	Petani	0,3
40	Sutik	Dusun Tego Rw 3	Sekardangan	50	1	SD	3	Pedagang	0,25
41	Sugiyo	Dusun Tego Rw 4	Sekardangan	53	2	SMP	4	Petani	0,3
42	Supartini	Dusun Tego Rw 5	Sekardangan	45	1	SD	5	Petani	0,2
43	Muhiyi	Dusun Tego Rw 5	Sekardangan	54	3	SMA	5	Petani	0,4

Lampiran B. Hasil Perhitungan Indikator Kinerja Gapoktan Karang Makmur oleh Anggota

No	Responden	Indikator Kinerja Gapoktan PUAP										Total
		Aspek Manajemen Pengelolaan LKMA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Ahmad Sueb	3	3	3	3	3	3	2	2	2	1	25
2	Eliyah	3	1	3	3	1	2	3	2	2	3	23
3	Mujiono	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	26
4	Misnanti	3	3	3	3	3	2	2	2	2	1	24
5	Jumaati	3	2	3	1	1	2	2	2	2	1	19
6	Maimunah	3	3	3	1	3	3	2	2	2	1	23
7	Buati	3	2	3	3	1	3	3	2	2	3	25
8	Tuplik Khasanah	3	1	3	3	3	3	3	2	2	1	24
9	Jumadi	3	3	3	3	3	2	2	2	2	1	24
10	Ponari	3	2	3	3	1	3	3	2	2	3	25
11	Sarinah	3	3	3	1	3	2	2	2	2	1	22
12	Karimah Ningsih	3	3	3	1	3	2	2	2	2	1	22
13	Hasanah	3	2	3	3	1	3	2	2	2	1	22
14	Sukirman	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	26
15	Solikan	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	27
16	Samitri	3	3	3	1	3	3	2	2	2	1	23
17	Maria Ulfa	3	2	3	3	1	3	2	2	2	3	24
18	Sunaini	3	3	3	1	3	3	2	2	2	3	25
19	Nur Hasan	3	3	3	3	3	2	3	2	2	1	25
20	H. Sayudi	3	3	1	3	3	2	2	2	2	1	22
21	Abd. Rohman	3	3	2	3	3	3	3	2	2	1	25
22	H. Karto	3	3	2	3	3	2	2	2	2	1	23
23	Amiri	3	3	3	3	3	2	3	2	2	1	25
24	Abd. Kholiq	3	3	3	3	3	2	2	2	2	1	24
25	Heri Wahyudi	3	3	3	3	3	2	2	2	1	3	25
26	Hanik Indra S.	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	24
27	Mulyono	3	2	3	3	1	3	3	2	2	1	23
28	Mulyadi	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	26
29	H. Sariyono	3	3	1	3	3	2	3	2	1	1	22
30	Illawati	3	3	2	3	3	2	2	2	2	3	25
31	Sri Hartini	3	2	2	3	1	2	3	2	2	3	23
32	M. Solikhin	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	26
33	Sanirah	3	3	3	1	3	3	2	2	2	1	23
34	H. Maimunah	3	3	1	3	3	3	3	2	1	1	23
35	Subandi	3	3	3	3	3	2	3	2	2	3	27
36	H. Sudirjo	3	3	1	3	3	2	3	2	2	1	23
37	Subadar	3	3	3	3	3	2	3	2	2	1	25

Lampiran B1. Lanjutan Hasil Perhitungan Indikator Kinerja Gapoktan Karang Makmur oleh Anggota

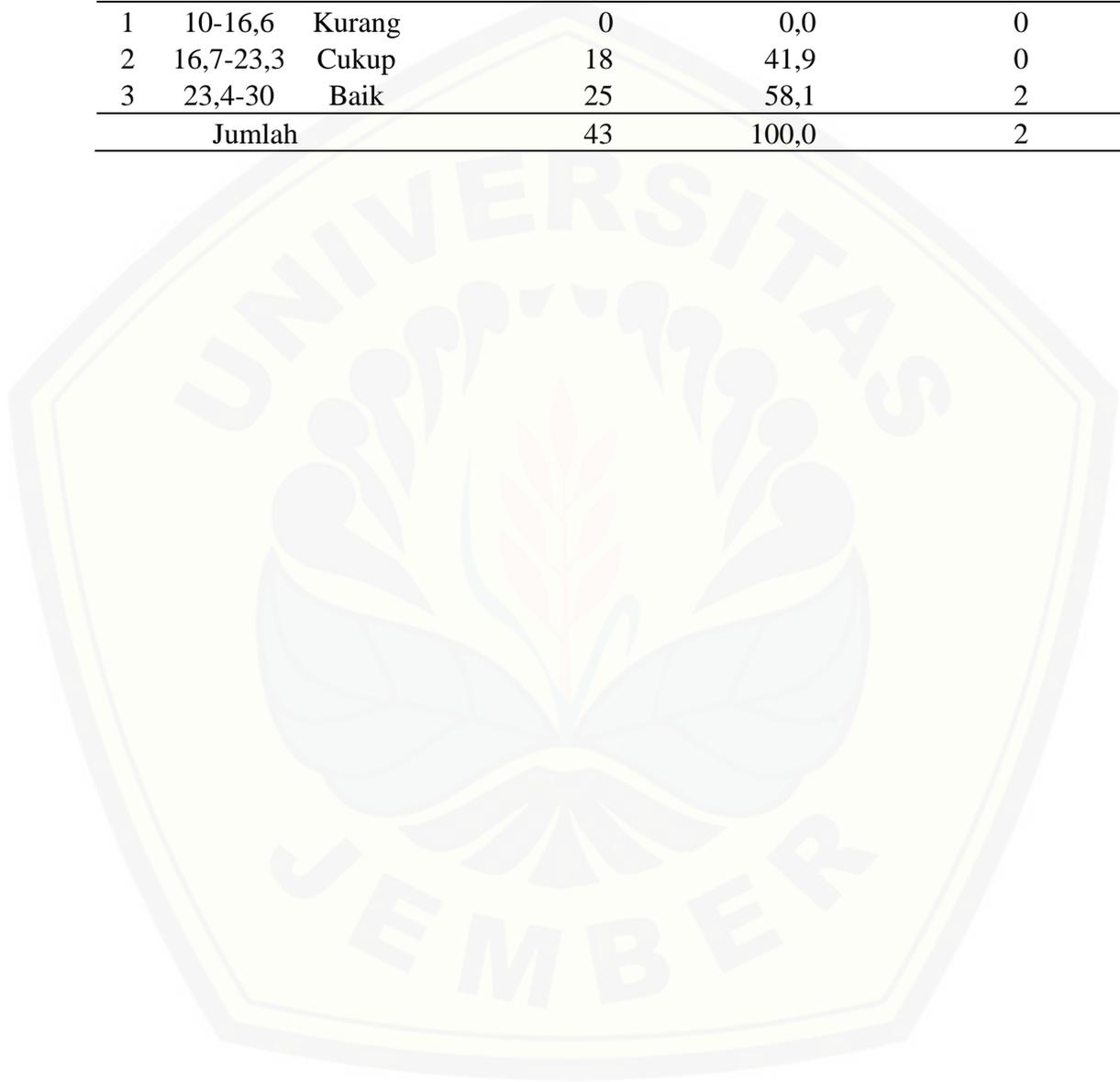
No	Responden	Indikator Kinerja Gapoktan PUAP										Total
		Aspek Manajemen Pengelolaan LKMA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
38	Supaat	3	3	3	1	3	3	2	2	2	1	23
39	Kasil Efendi	3	3	3	3	3	3	2	2	2	1	25
40	Sutik	3	2	3	3	1	2	2	2	1	3	22
41	Sugiyo	3	3	3	3	3	2	2	2	2	1	24
42	Supartini	3	3	3	3	3	2	2	2	1	1	23
43	Muhiyi	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	28

Lampiran B2. Hasil Perhitungan Indikator Kinerja Gapoktan Karang Makmur oleh Pengelola LKMA

No	Responden	Indikator Kinerja Gapoktan PUAP										Total
		Aspek Manajemen Pengelolaan LKMA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Arif Harun Al-Rosyid	3	3	3	3	2	2	3	3	2	2	26
2	Illawati	3	3	3	3	2	2	3	3	2	2	26

Lampiran C. Penilaian Kinerja Gapoktan Karang Makmur Desa Karangbendo
Kabupaten Lumajang Tahun 2015

No	Skor	Kinerja	Penilai			
			Anggota		Pengelola LKMA	
			Jumlah (Orang)	Persentase (%)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	10-16,6	Kurang	0	0,0	0	0
2	16,7-23,3	Cukup	18	41,9	0	0
3	23,4-30	Baik	25	58,1	2	100
Jumlah			43	100,0	2	100



Lampiran D. Penilaian Pencatatan dan Pembukuan

No	Kategori	Penilai			
		Anggota		Pengelola LKMA	
		Jumlah (Orang)	Persentase (%)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Kurang	0	0	0	0
2	Cukup	0	0	0	0
3	Baik	43	100	2	100
	Jumlah	43	100	2	100

Lampiran E. Penilaian Penyaluran untuk Usaha Pertanian

No	Kategori	Penilai			
		Anggota		Pengelola LKMA	
		Jumlah (Orang)	Persentase (%)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Kurang	2	4,7	0	0
2	Cukup	8	18,6	0	0
3	Baik	33	76,7	2	100
	Jumlah	43	100,0	2	100

Lampiran F. Pekerjaan Anggota Penerima Bantuan Modal Usaha Dana PUAP Gapoktan Karang Makmur

No	Pekerjaan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Petani	32	74,4
2	Peternak	2	4,7
3	Pedagang	9	20,9
	Jumlah	43	100,0

Lampiran G. Penilaian Pembiayaan kepada Petani Miskin

No	Kategori	Penilai			
		Anggota		Pengelola LKMA	
		Jumlah (Orang)	Persentase (%)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Kurang	4	9,3	0	0
2	Cukup	4	9,3	0	0
3	Baik	35	81,4	2	100
	Jumlah	43	100,0	2	100

Lampiran H. Luas Lahan Anggota Penerima Bantuan Modal Usaha Dana PUAP
Gapoktan Karang Makmur

No	Luas Lahan (Ha)	Jumlah (Orang)	Persentase(%)
1	<0,5 Ha	35	81,4
2	≥0,5 Ha	8	18,6
Jumlah		43	100,0

Lampiran I. Penilaian Pengendalian Penyaluran Dana

No	Kategori	Penilai			
		Anggota		Pengelola LKMA	
		Jumlah (Orang)	Persentase (%)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Kurang	8	18,6	0	0
2	Cukup	0	0,0	0	0
3	Baik	35	81,4	2	100
Jumlah		43	100,0	2	100

Lampiran J. Penilaian Pembinaan Usaha Anggota

No	Kategori	Penilai			
		Anggota		Pengelola LKMA	
		Jumlah (Orang)	Persentase (%)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Kurang	9	20,9	0	0
2	Cukup	0	0,0	0	0
3	Baik	34	79,1	2	100
Jumlah		43	100,0	2	100

Lampiran K. Penilaian Analisa Kelayakan Usaha Anggota

No	Kategori	Penilai			
		Anggota		Pengelola LKMA	
		Jumlah (Orang)	Persentase (%)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Kurang	0	0,0	0	0
2	Cukup	22	51,2	2	100
3	Baik	21	48,8	0	0
Jumlah		43	100,0	2	100

Lampiran L. Penilaian Mekanisme Insentif dan Sanksi

No	Kategori	Penilai			
		Anggota		Pengelola LKMA	
		Jumlah (Orang)	Persentase (%)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Kurang	0	0,0	0	0
2	Cukup	25	58,1	2	100
3	Baik	18	41,9	0	0
	Jumlah	43	100,0	2	100

Lampiran M. Penilaian Sarana dan Prasarana LKMA

No	Kategori	Penilai			
		Anggota		Pengelola LKMA	
		Jumlah (Orang)	Persentase (%)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Kurang	0	0	0	0
2	Cukup	43	100	2	100
3	Baik	0	0	0	0
	Jumlah	43	100,0	2	100

Lampiran N. Inventaris Gapoktan Karang Makmur

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	Kalkulator	2	Baik
2	Alat Scan Uang	1	Baik
3	Laptop	1	Baik
4	Printer	1	Baik
5	Flashdisk	1	Baik
6	Lemari	1	Baik
7	Meja	2	Baik
8	Kursi	5	Baik
9	Papan Tulis	1	Baik

Lampiran O. Penilaian Pelaporan

No	Kategori	Penilai			
		Anggota		Pengelola LKMA	
		Jumlah (Orang)	Persentase (%)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Kurang	6	14	0	0
2	Cukup	37	86	2	100
3	Baik	0	0	0	0
	Jumlah	43	100	2	100

Lampiran P. Penilaian Pengawasan Pembiayaan

No	Kategori	Penilai			
		Anggota		Pengelola LKMA	
		Jumlah (Orang)	Persentase (%)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Kurang	30	69,8	0	0
2	Cukup	0	0,0	0	0
3	Baik	13	30,2	2	100
	Jumlah	43	100,0	2	100

Lampiran Q. Tahap Pencairan Dana BLM PUAP Gapoktan Karang Makmur

No	Tanggal Penarikan	Jumlah Penarikan (Rp)
1	28 Desember 2012	33.500.000
2	23 Januari 2013	42.000.000
3	1 Agustus 2013	24.500.000
Jumlah		100.000.000

Lampiran R. Jumlah Petani Anggota Penerima Dana BLM PUAP

No	Program PUAP (Tahun)	Dana PUAP (Rp)	Jumlah Anggota (Orang)	Peminjam (Orang)	Persentase(%)
1	2012	100.000.000	793	0	0,0
2	2013	108.923.300	793	147	18,5
3	2014	117.826.000	793	159	20,1
4	2015	122.392.000	793	173	21,8

Lampiran S. Kuesioner

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS PERTANIAN
PROGRAM STUDI AGRIBISNIS

Anggota

KUISIONER

Judul Penelitian : Evaluasi Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) pada Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Karang Makmur Lumajang

Lokasi : Desa Karangbendo Kabupaten Lumajang

IDENTITAS RESPONDEN

Nama :
Alamat :
Kelompok Tani :
Umur :
Pengalaman Kredit : kali
Pendidikan Terakhir :
Jumlah Anggota keluarga : orang
Pekerjaan :
Luas Lahan : Ha

PEWAWANCARA

Nama : Aini Masruroh
NIM : 111510601041
Tanggal Wawancara :

Aspek Manajemen Pengelolaan LKMA

1. Dana PUAP yang Bapak/ Ibu terima dari gapoktan digunakan untuk usaha apa?
- Usaha *on farm*
 - Usaha *off farm*
 - Usaha non pertanian

Jelaskan!.....
.....
.....

2. Berapa luas lahan sawah yang Bapak/ Ibu miliki?
- $<0,5$ Ha
 - $0,5 \text{ Ha} \leq x < 1 \text{ Ha}$
 - ≥ 1 Ha

Jelaskan!.....
.....
.....

3. Apakah ada pengendalian penyaluran dana yang dilakukan oleh gapoktan dalam pengelolaan dana PUAP?
- Ada
 - Kadang-kadang
 - Tidak ada

Jelaskan!.....
.....
.....

4. Apakah ada pencatatan dan pembukuan dalam aktivitas pengelolaan dana oleh gapoktan?
- Ada dan lengkap (neraca dan laporan laba/rugi)
 - Ada, tapi tidak lengkap (hanya buku kas)
 - Tidak ada

Jelaskan!.....
.....
.....

5. Apakah ada analisa kelayakan usaha anggota sebelum diberikan bantuan dana PUAP?

- a. Ada analisa
- b. Kadang-kadang dianalisa
- c. Tidak ada analisa

Jelaskan!.....

.....

.....

6. Apakah ada pelaporan yang dibuat oleh pengurus gapoktan dalam mengelola dana PUAP?

- a. Ada
- b. Kadang-kadang
- c. Tidak ada

Jelaskan!

.....

.....

7. Apakah ada pembinaan usaha bagi anggota penerima bantuan dana PUAP?

- a. Ada
- b. Kadang-kadang
- c. Tidak ada

Jelaskan!

.....

.....

8. Apakah ada pengawasan dalam hal penyaluran dana oleh gapoktan kepada anggota penerima agar penggunaan sesuai dengan sasaran?

- a. Ada
- b. Kadang-kadang
- c. Tidak ada

Jelaskan!

.....

.....

9. Apakah ada mekanisme insentif dan sanksi dalam gapoktan?

- a. Ada
- b. Kadang-kadang
- c. Tidak ada

Jelaskan!.....

.....

.....

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS PERTANIAN
PROGRAM STUDI AGRIBISNIS

Pengelola LKMA

KUISIONER

Judul Penelitian : Evaluasi Program Pengembangan Usaha Agribisnis
Perdesaan (PUAP) pada Gabungan Kelompok Tani
(GAPOKTAN) Karang Makmur Lumajang

Lokasi : Desa Karangbendo Kabupaten Lumajang

IDENTITAS RESPONDEN

Nama :
Alamat :
Kelompok Tani :
Umur :
Pengalaman Kredit : kali
Pendidikan Terakhir :
Jumlah Anggota keluarga : orang
Pekerjaan :
Luas Lahan : Ha

PEWAWANCARA

Nama : Aini Masruroh
NIM : 111510601041
Tanggal Wawancara :

Aspek Manajemen Pengelolaan LKMA

1. Berapa persentase penyaluran dana untuk usaha pertanian?

- a. >80% untuk usaha pertanian
- b. 50-80% untuk usaha pertanian
- c. <50% untuk usaha pertanian

Jelaskan!.....

.....

.....

2. Berapa persentase penyaluran dana untuk pembiayaan kepada petani miskin?

- a. >80% untuk petani miskin
- b. 50-80% untuk petani miskin
- c. <50% untuk petani miskin

Jelaskan!

.....

.....

3. Apakah ada pengendalian penyaluran dana yang dilakukan oleh gapoktan dalam pengelolaan dana PUAP?

- a. Ada
- b. Kadang-kadang
- c. Tidak ada

Jelaskan!

.....

.....

4. Apakah ada pencatatan dan pembukuan dalam aktivitas pengelolaan dana oleh gapoktan?

- a. Ada dan lengkap (neraca dan laporan laba/rugi)
- b. Ada, tapi tidak lengkap (hanya buku kas)
- c. Tidak ada

Jelaskan!.....

.....

.....

5. Apakah ada analisa kelayakan usaha anggota sebelum diberikan bantuan dana PUAP?

- a. Ada analisa
- b. Kadang-kadang dianalisa
- c. Tidak ada analisa

Jelaskan!.....

.....

.....

6. Apakah ada pelaporan yang dibuat oleh pengurus gapoktan dalam mengelola dana PUAP?

- a. Ada
- b. Kadang-kadang
- c. Tidak ada

Jelaskan!

.....

.....

7. Apakah ada pembinaan usaha bagi anggota penerima bantuan dana PUAP?

- a. Ada
- b. Kadang-kadang
- c. Tidak ada

Jelaskan!

.....

.....

8. Apakah ada pengawasan dalam hal penyaluran dana oleh gapoktan kepada anggota penerima agar penggunaan sesuai dengan sasaran?

- a. Ada
- b. Kadang-kadang
- c. Tidak ada

Jelaskan!

.....

.....

9. Apakah ada mekanisme insentif dan sanksi dalam gapoktan?

- a. Ada
- b. Kadang-kadang
- c. Tidak ada

Jelaskan!.....

.....

.....

10. Apakah pada kantor LKMA ada komputer, kendaraan operasional, buku tabungan dan buku pinjaman anggota, formulir pengajuan pinjaman, buku kas?

a. Ada, lengkap

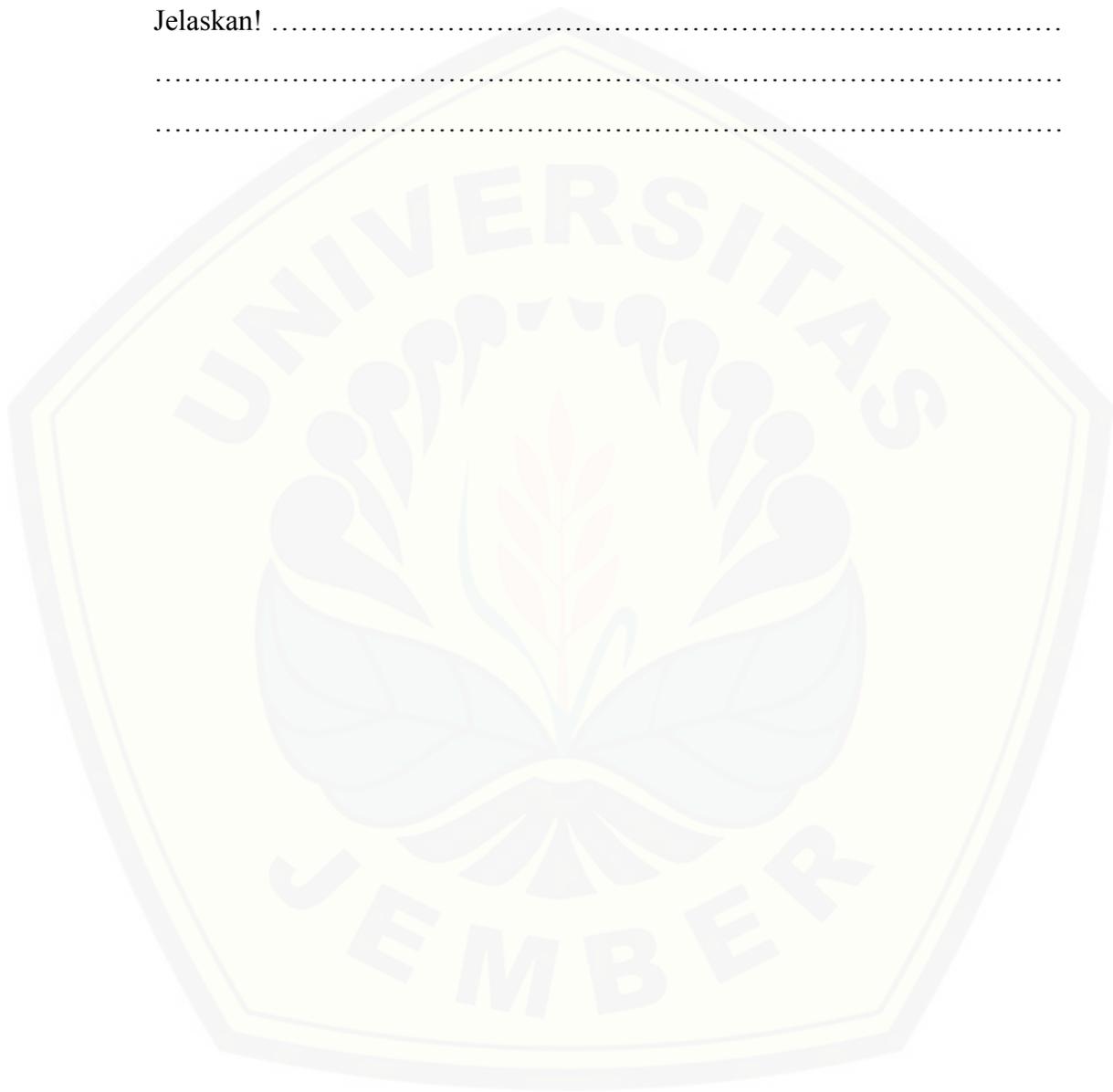
b. Ada, terbatas

c. Tidak ada

Jelaskan!

.....

.....



UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS PERTANIAN
PROGRAM STUDI AGRIBISNIS

KUESIONER

Judul Penelitian : **Evaluasi Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) pada Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Karang Makmur Lumajang**

Lokasi : **Desa Karangbendo Kabupaten Lumajang**

IDENTITAS INFORMAN

Nama :
Alamat :
Umur :
Pendidikan Terakhir :
Jumlah Anggota keluarga : orang
Pekerjaan :
Luas Lahan : Ha

PEWAWANCARA

Nama : Aini Masrurroh
NIM : 111510601041
Tanggal Wawancara :

1. Apa yang Anda ketahui tentang program PUAP?
.....
2. Bagaimana bentuk pengelolaan program PUAP yang dilaksanakan oleh gapoktan?
.....
3. Bagaimana pendapat Anda mengenai bentuk pengelolaan program PUAP tersebut?
.....
4. Bagaimana pendapat Anda mengenai pengelolaan tersebut? Apakah terdapat perkembangan dana PUAP?
.....
5. Bagaimana upaya gapoktan dalam mengembangkan dana PUAP?
.....
6. Berapa jumlah dana PUAP yang berhasil dikelola oleh gapoktan?
.....
7. Berapa jumlah peningkatan dana PUAP yang berhasil dikelola oleh gapoktan?
.....
8. Berapa jumlah Sisa Hasil Usaha (SHU) yang berhasil dikumpulkan oleh gapoktan?
.....
9. Darimana Sisa Hasil Usaha (SHU) tersebut diperoleh?
.....
10. Berapa besarnya biaya administrasi dan bunga yang dibebankan kepada petani?
.....
11. Bagaimana mekanisme pencairan dana PUAP oleh gapoktan sebelum disalurkan kepada petani?
.....

12. Berapa jumlah pinjaman dana PUAP yang diterima oleh masing-masing petani?

.....

13. Apakah terdapat persyaratan bagi petani untuk bisa memperoleh pinjaman dana PUAP dari gapoktan? jika iya, sebutkan!

.....

14. Bagaimana pendapat Anda mengenai persyaratan tersebut?

.....

15. Apakah terdapat jaminan/ agunan yang harus diserahkan oleh petani kepada gapoktan untuk bisa memperoleh pinjaman dana PUAP? jika iya, sebutkan bentuk jaminan/ agunannya!

.....

16. Apakah terdapat peningkatan jumlah petani yang memperoleh pinjaman dana PUAP?

.....

17. Berapa peningkatan jumlah petani yang memperoleh pinjaman dana PUAP hingga saat ini?

.....

18. Bagaimana manfaat yang dirasakan dari adanya program PUAP bagi kegiatan agribisnis di sektor hulu?

.....

19. Bagaimana manfaat yang dirasakan dari adanya program PUAP bagi kegiatan agribisnis di sektor budidaya?

.....

20. Bagaimana manfaat yang dirasakan dari adanya program PUAP bagi kegiatan agribisnis di sektor hilir?

.....

Lampiran T. Dokumentasi



Gambar 1. Transaksi Pembayaran Pinjaman Dana PUAP oleh Petani kepada Pengelola LKMA di Kantor LKMA Desa Karangbendo Kabupaten Lumajang



Gambar 2. Pertemuan Pengurus Gapoktan dan Wakil Kelompok Tani dengan Penyuluh di Sekretariat Gapoktan Karang Makmur Desa Karangbendo Kabupaten Lumajang



Gambar 3. Bantuan yang Diterima oleh Gapoktan Karang Makmur Berupa Mesin *Transplanter* dan Pupuk Bersubsidi dari Pemerintah



Gambar 4. Wawancara dengan Petani Anggota Gapoktan Karang Makmur